

# Laporan Kinerja OJK 2015



# Daftar Isi

03	Kata Pengantar
05	Bab 1 - Tentang OJK
13	Bab 2 - Kondisi Makroekonomi dan Perkembangan Sektor Jasa Keuangan
27	Bab 3 - <i>Highlight</i> Program Strategis OJK 2015 Untuk Pengembangan Sektor Jasa Keuangan
49	Bab 4 - <i>Highlight</i> Program Strategis OJK 2015 Untuk Peningkatan Kapasitas Organisasi
59	Bab 5 - Pelaksanaan Tugas Pokok OJK 2015
71	Bab 6 - Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)
77	Bab 7 - Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)
87	Bab 8 - Arah Strategi OJK

**P**uji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan perlindunganNya sehingga sepanjang tahun 2015 OJK dapat menjalankan tugas dan fungsi pokok dengan baik. Pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan juga berjalan relatif lancar tanpa adanya gejala yang berarti di tengah kondisi perekonomian global dan domestik yang masih dalam proses pemulihan.

Pertumbuhan ekonomi global terus mengalami pemulihan meski berjalan lebih lambat, didorong revisi proyeksi perekonomian *emerging markets*, khususnya negara pengekspor komoditas. Hal ini sejalan dengan berlanjutnya pelemahan harga komoditas dunia. Pertumbuhan global didukung oleh perbaikan ekonomi AS yang semakin solid dibarengi dengan revisi proyeksi pertumbuhan. Di sisi lain, pemulihan perekonomian zona Eropa masih terbatas tercermin dari perlambatan pertumbuhan ekonomi 2015. Hal ini juga diikuti oleh perekonomian Tiongkok yang terus melambat tercermin dari melambatnya kinerja ekspor-impor serta menurunnya *industrial profit* sejalan dengan kinerja manufaktur yang terkontraksi.

Sampai dengan triwulan III-2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,73% didorong meningkatnya permintaan domestik dan ekspansi belanja Pemerintah baik untuk investasi maupun konsumsi yang mulai meningkat. Nilai tukar rupiah mengalami penurunan sebesar -10,77% dipengaruhi sejumlah faktor global antara lain ketidakpastian kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR), kekhawatiran kesepakatan *bailout* Yunani, dan depresiasi Yuan ditengah terus berlanjutnya perlambatan Tiongkok. Dari faktor domestik, kekhawatiran perlambatan ekonomi domestik dan meningkatnya permintaan valas untuk memenuhi kebutuhan ritel/korporasi dalam rangka pembayaran utang dan dividen musiman turut memberi tekanan terhadap Rupiah.

Secara umum kondisi industri keuangan domestik masih terjaga baik, dengan stabilitas yang memadai. Pertumbuhan aset dan kredit Bank selama 2015 didukung oleh tingkat kesehatan bank (CAR) yang meningkat jauh di atas *threshold*. Pertumbuhan aset juga terjadi di seluruh lini bisnis Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Di sisi lain, tekanan terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan yang mengalami penurunan selama 2015 akibat perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian kenaikan *Fed Fund Rate*. Namun demikian, terjadi kenaikan baik jumlah Reksa Dana maupun nilai dari NAB Reksa Dana.

Selama 2015, OJK telah mengeluarkan 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk mengatur sektor jasa keuangan. POJK ini meliputi 15 peraturan di sektor perbankan, 30 peraturan di sektor pasar modal, 16 peraturan di sektor industri keuangan non bank, dan 1 peraturan mengenai penyidikan sektor jasa keuangan.

Untuk mengembangkan sektor jasa keuangan, beberapa program strategis telah kami jalankan antara lain penerbitan 45 kebijakan untuk stimulus ekonomi, peluncuran Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI), Pendalaman Pasar (*Market Deepening*) Pasar Modal, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT), Pelaksanaan Program Jangkau, Sinergi dan *Guideline* (Program JARING), Peluncuran Tabungan SIMPEL dan Implementasi Pengawasan Terintegrasi. Untuk mendukung pengembangan sektor jasa keuangan syariah, OJK telah meluncurkan *Road Map* Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah dan IKNB Syariah serta meluncurkan kegiatan Aku Cinta Keuangan Syariah (AKCS).

OJK terus melakukan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui pengembangan program inklusi keuangan “Yuk Sikapi”, *Pilot Project* Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro), penyusunan alat peraga edukasi keuangan tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah dasar, penyelenggaraan Pasar Keuangan Rakyat, pelaksanaan kampanye nasional literasi keuangan melalui operasionalisasi Si Molek serta Edukasi ke beberapa komunitas. Berkaitan dengan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan 24.328 layanan kepada konsumen dan masyarakat yang terdiri dari penerimaan informasi sebanyak 14.777, pemberian informasi sebanyak 8.836 dan pengaduan sebanyak 715 pengaduan melalui layanan *Financial Customer Care* (FCC). Selain itu, OJK bersama asosiasi telah mendirikan 7 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk membantu penyelesaian sengketa konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Untuk mendukung peningkatan kinerja, OJK terus melengkapi sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) dengan berbagai aplikasi untuk mendukung pengelolaan kinerja antara lain dengan melakukan *alignment* penilaian kinerja organisasi dengan penilaian kerja individual. OJK juga memperkuat dukungan sumber daya manusia dengan mengembangkan OJK *Institute* sebagai tempat yang mendukung pengembangan pengetahuan karyawan. OJK juga telah melakukan pengembangan aplikasi sistem informasi untuk mendukung pengawasan sektor jasa keuangan.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK telah menyelesaikan revisi Protokol Manajemen Krisis (PMK) yang menjadi payung hukum bagi internal organisasi dalam rangka pencegahan dan penanganan kondisi tidak normal. OJK juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) baik pada level teknis, deputy hingga rapat anggota FKSSK (*high level meeting*). Salah satu program FKSSK yang sedang dilaksanakan adalah pembahasan RUU JPSK dimana tindak lanjut dari pembahasan RUU JPSK, telah dibentuk lima *working group* FKSSK yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing institusi anggota FKSSK dengan tujuan mengoordinasikan kegiatan penyusunan panduan pelaksanaan penanganan gangguan SSK yang difokuskan pada topik-topik tertentu.

Dalam rangka mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, berkelanjutan dan stabil, OJK telah melakukan 8 penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian dan Lembaga di dalam negeri, 5 penandatanganan Nota Kesepahaman dengan pihak terkait di luar negeri dan menjadi anggota dari 12 organisasi keuangan internasional.

OJK akan terus berupaya meningkatkan kinerjanya agar fungsi dan tugas OJK dapat dilakukan dengan baik dan keberadaan OJK lebih dirasakan oleh masyarakat luas. OJK juga selalu mengharapkan dukungan dari berbagai pihak terutama Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Bank Indonesia dalam mewujudkan industri keuangan nasional yang stabil, kontributif dan inklusif.

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD, Ph.D



Bab 1

---

# Tentang OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan

# Latar Belakang Sejarah Pembentukan OJK

## 22 November 2011

Pengesahan Undang – Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

## 16 Juli 2012

Presiden menetapkan sembilan Anggota Dewan Komisiner OJK, termasuk dua Anggota Dewan Komisiner OJK ex officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

## 15 Agustus 2012

Pembentukan Tim Transisi OJK Tahap I untuk membantu Dewan Komisiner OJK dalam melaksanakan tugas selama masa transisi.

## 31 Desember 2012

Dimulainya operasionalisasi OJK dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

## 18 Maret 2013

Pembentukan Tim Transisi OJK Tahap II untuk membantu Dewan Komisiner OJK dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari BI kepada OJK.

## 31 Desember 2013

Pengawasan Perbankan beralih dari BI kepada OJK dan dimulainya operasionalisasi Kantor OJK secara penuh di seluruh Indonesia.

## Visi, Misi dan *Destination Statement*



Misi adalah tujuan pendirian OJK. Berdasarkan Misi tersebut OJK menetapkan Visi, yaitu kondisi yang ingin dicapai OJK dalam jangka panjang (25-30 tahun). Untuk mewujudkan Visi tersebut, OJK menyusun tahapan berupa *Destination Statement* yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam 3-5 tahun, sebagaimana tercermin dalam kondisi-kondisi utama dan persyaratannya.

### Misi OJK

- Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

### *Destination Statement* 2017

- Menjadi lembaga profesional dlm pengaturan dan pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang terintegrasi, guna mewujudkan pasar keuangan yang dalam (*financial market deepening*) dan inklusif, serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat, mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan

### Visi OJK

- Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

### Kondisi Utama

1. Sistem Keuangan yang stabil dan berkelanjutan
2. Sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi
3. Edukasi dan perlindungan konsumen yang optimal
4. *Strategic Support* yang Handal
5. Pengembangan SJK yang stabil dan berkesinambungan
6. Pengaturan SJK yang selaras dan terintegrasi



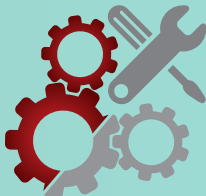
### Tujuan



OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan:

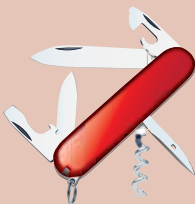
- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat

### Fungsi



OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan

### Tugas



OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

### Pengaturan

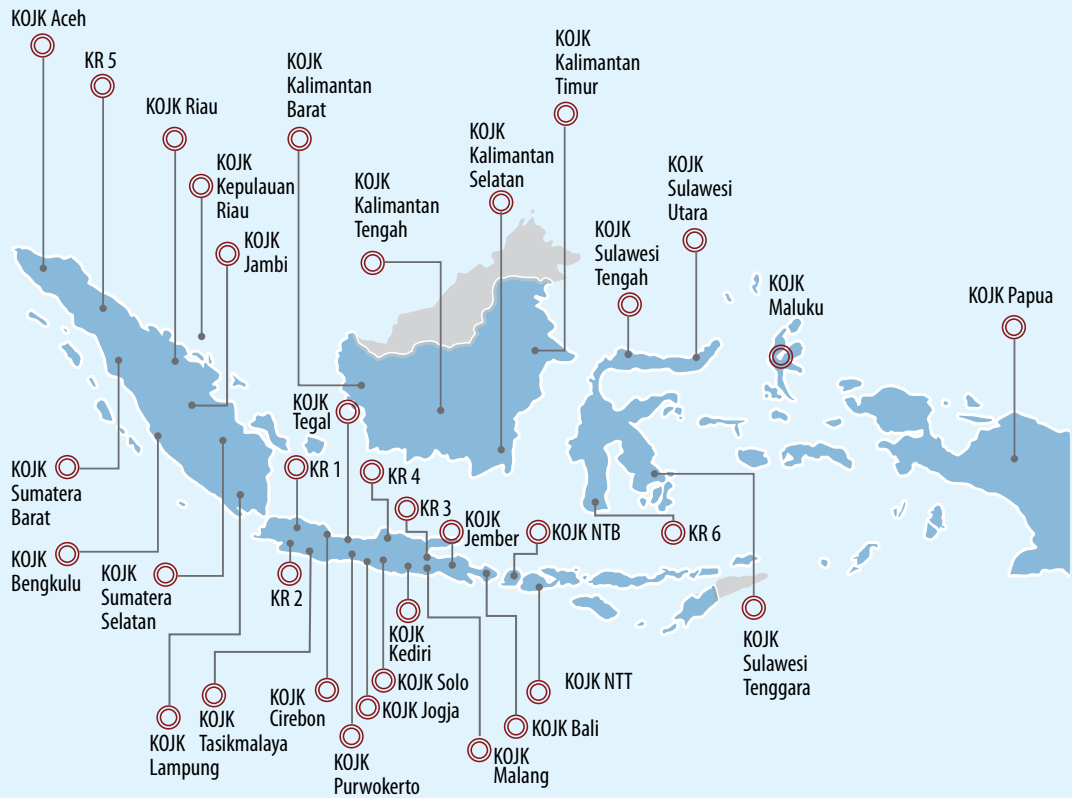
- Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- Menetapkan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan;
- Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di Sektor Jasa Keuangan;
- Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

### Pengawasan

- Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan;
- Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; dan
- Memberikan dan/atau mencabut izin usaha; izin orang perseorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

NILAI –NILAI STRATEGIS OJK	MAKNA NILAI	PERILAKU UTAMA
<p><b>1 INTEGRITAS</b></p> 	<p>Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jujur dan dipercaya</li> <li>2. Bijak</li> <li>3. Konsisten dalam perkataan dan perbuatan.</li> </ol>
<p><b>2 PROFESIONALISME</b></p> 	<p>Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belajar berkelanjutan</li> <li>2. Memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan</li> <li>3. Berkomitmen terhadap hasil karya yang berkualitas.</li> </ol>
<p><b>3 SINERGI</b></p> 	<p>Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun rasa saling percaya dan saling menghargai</li> <li>2. Berkomunikasi secara efektif</li> <li>3. Mencari solusi terbaik untuk memperoleh nilai tambah</li> </ol>
<p><b>4 INKLUSIF</b></p> 	<p>Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghargai keberagaman</li> <li>2. Berperilaku adil</li> <li>3. Partisipatif, konstruktif, fasilitatif, dan edukatif.</li> </ol>
<p><b>5 VISIONER</b></p> 	<p>Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (<i>forward looking</i>) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (<i>out of the box thinking</i>).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencari dan mengembangkan konsep dan ide baru</li> <li>2. Melihat jauh ke depan</li> <li>3. Menginspirasi dan mendukung perubahan.</li> </ol>

# Jaringan KR/KOJK





Bab 2

---

**Kondisi  
Makroekonomi**  
dan Perkembangan  
Sektor Jasa Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

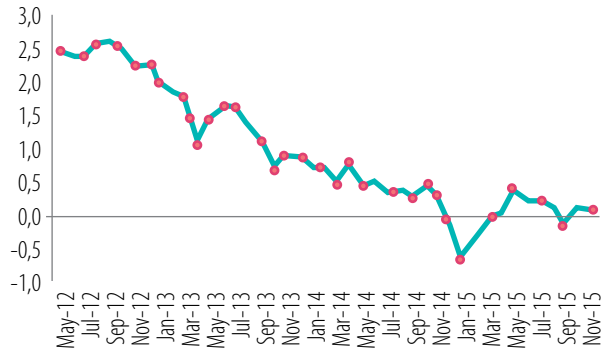
## Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global (% yoy)

	2014	Proyeksi 2015	
		Juli	Okt
Pertumbuhan Ekonomi Global	3,4	3,3	3,1
<i>Advance Countries</i>			
- Amerika Serikat	2,4	2,5	2,6
- Zona Eropa	0,9	1,5	1,5
- Jepang	-0,1	0,8	0,6
<i>Emerging Market dan Developing Economies</i>			
- Tiongkok	7,3	6,8	6,8
- Rusia	0,6	-3,4	-3,8
- Brazil	0,1	-1,5	-3,0

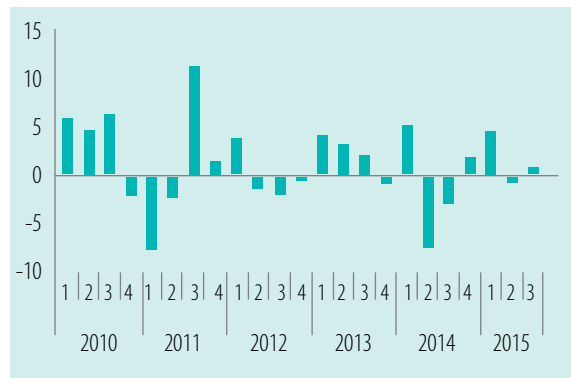
Sumber : World Economic Outlook, IMF - Oktober 2015

- Berdasarkan data World Economic Outlook (IMF), pertumbuhan ekonomi global 2015 diperkirakan tumbuh lebih lambat menjadi 3,1% yoy didorong revisi proyeksi perekonomian *emerging markets*, khususnya negara pengekspor komoditas sejalan berlanjutnya pelemahan harga komoditas dunia.
- Pertumbuhan global didukung oleh perbaikan ekonomi AS yang semakin solid sehingga the Fed memutuskan kenaikan suku bunga acuan pada Desember 2015, sejalan dengan revisi proyeksi pertumbuhan menjadi 2,6% yoy
- Pemulihan perekonomian zona Eropa masih terbatas tercermin dari perlambatan pertumbuhan ekonomi 2015 dengan tingkat inflasi (November 2015) 0,1% yoy.
- Pertumbuhan ekonomi Jepang triwulan III-2015 tumbuh 1% yoy, lebih tinggi dari ekpektasi pasar sehingga meredakan kekhawatiran terhadap resesi ekonomi Jepang. Namun demikian, pemilihan ekonomi masih bersifat terbatas dipengaruhi masih lemahnya permintaan domestik tercermin dari menurunnya penjualan ritel dan belum stabilnya pasar tenaga kerja yang terlihat dari menurunnya pertumbuhan gaji.
- Perekonomian Tiongkok terus melambat tercermin dari lambatnya kinerja ekspor-impor serta menurunnya *industrial profit* sejalan dengan kinerja manufaktur yang berkontraksi.

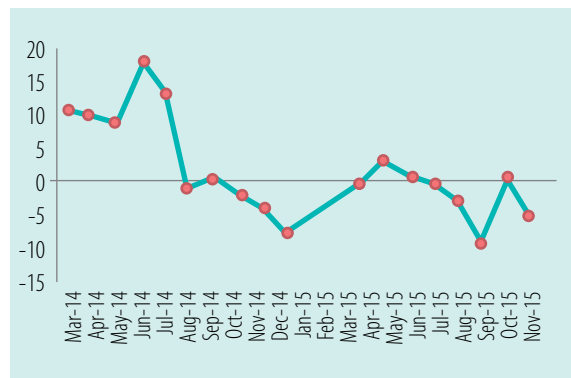
## Inflation Rate yoy Zona Eropa



## Pertumbuhan Ekonomi Jepang yoy

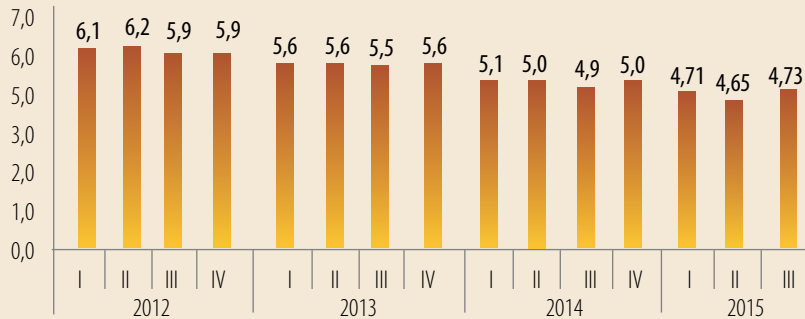


## Industrial Profit Tiongkok



# Kondisi Makroekonomi Indonesia

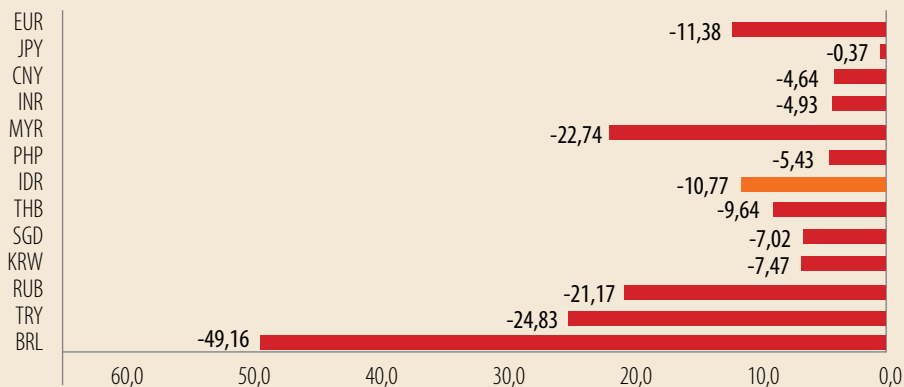
## Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik

## Nilai Tukar Rupiah

31 Desember 2015 VS 31 Desember 2014



- ❖ Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2015 tercatat sebesar 4,73% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II-2015 sebesar 4,67% (yoy). Perbaikan kinerja ekonomi didorong meningkatnya permintaan domestik sejalan dengan ekspansi belanja Pemerintah baik untuk investasi maupun konsumsi yang mulai meningkat.
- ❖ Rupiah terdepresiasi sebesar 10,77% dibandingkan akhir 2014. Pelemahan Rupiah dipengaruhi sejumlah faktor global antara lain ketidakpastian kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR), kekhawatiran kesepakatan *bailout* Yunani, dan depresiasi Yuan ditengah terus berlanjutnya perlambatan Tiongkok. Dari faktor domestik, kekhawatiran perlambatan ekonomi domestik dan meningkatnya permintaan valas untuk memenuhi kebutuhan ritel/korporasi dalam rangka pembayaran utang dan dividen musiman turut memberi tekanan terhadap Rupiah.



### Aset, Kredit dan Dana Pihak Ketiga

Dalam Triliun Rupiah

Rasio	Desember 2014	Oktober 2015	% Pertumbuhan (ytd)
<b>Total Aset</b>	5.404,40	5.795,85	↑ 7,24%
<b>Kredit</b>	3.521,83	3.773,05	↑ 7,13%
<b>Dana Pihak Ketiga</b>	3.940,49	4.204,55	↑ 6,70%
- Giro	874,89	1.017,37	↑ 16,29%
- Tabungan	1.232,95	1.222,72	↓ -0,83%
- Deposito	1.832,65	1.964,45	↑ 7,19%
<b>CAR (%)</b>	19,57	21,05	↑ 1,48
<b>ROA (%)</b>	2,85	2,30	↓ -0,55
<b>NIM(%)</b>	4,23	5,34	↑ 1,11
<b>BOPO (%)</b>	76,29	81,11	↑ 4,82
<b>NPL Gross (%)</b>	2,04	2,58	↑ 0,53
<b>NPL Net (%)</b>	0,98	1,24	↑ 0,26
<b>LDR</b>	89,42	89,74	↑ 0,32

- ❖ Perkembangan Aset Bank Umum Konvensional (BUK) selama 2015 cukup baik. Sampai dengan Oktober 2015, Asset BUK tumbuh 7,24% (ytd). Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 7,13% dan 6,70%
- ❖ Kondisi permodalan BUK (CAR) di Indonesia meningkat pada Oktober 2015 menjadi 21,05%, lebih tinggi dibandingkan dengan akhir Desember 2014 sebesar 19,57%
- ❖ Berdasarkan sisi margin bisnis, terjadi kenaikan *net interest margin* pada BUK menjadi 5,34% dibandingkan akhir 2014 sebesar 4,23%.

## Perkembangan Sektor Perbankan

### Aset, Kredit dan Dana Pihak Ketiga – Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

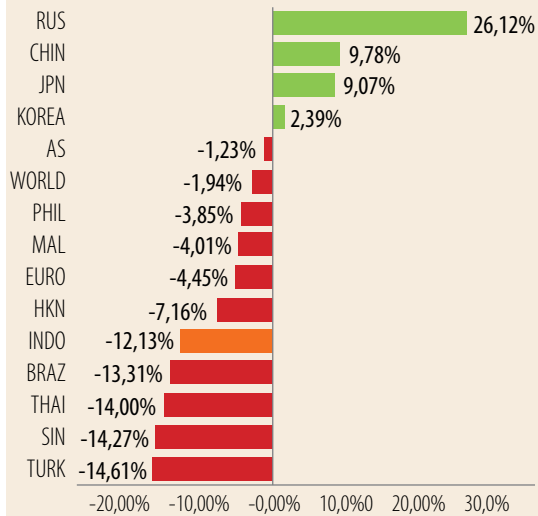
Dalam Triliun Rupiah

Rasio	Desember 2014	Oktober 2015	% Pertumbuhan (ytd)
<b>Total Aset</b>	89,88	98,63	↑ 9,7%
<b>Kredit</b>	68,39	74,28	↑ 8,6%
<b>Dana Pihak Ketiga</b>	58,75	65,06	↑ 10,7%
- Tabungan	18,83	19,76	↑ 4,9%
- Deposito	39,92	45,30	↑ 13,5%
<b>NPL Gross (%)</b>	4,75	6,13	↑ 1,38
<b>NPL Net (%)</b>	2,88	3,84	↑ 0,96
<b>ROA (%)</b>	2,98	2,77	↓ -0,21
<b>LDR (%)</b>	79,79	79,53	↓ -0,26
<b>CR (%)</b>	19,56	16,60	↓ -2,96
<b>KAP (%)</b>	3,31	4,12	↑ 0,81
<b>ROE (%)</b>	27,89	25,11	↓ -2,78
<b>BOPO (%)</b>	80,21	81,91	↑ 1,7
<b>CAR (%)</b>	22,34	21,47	↓ -0,87

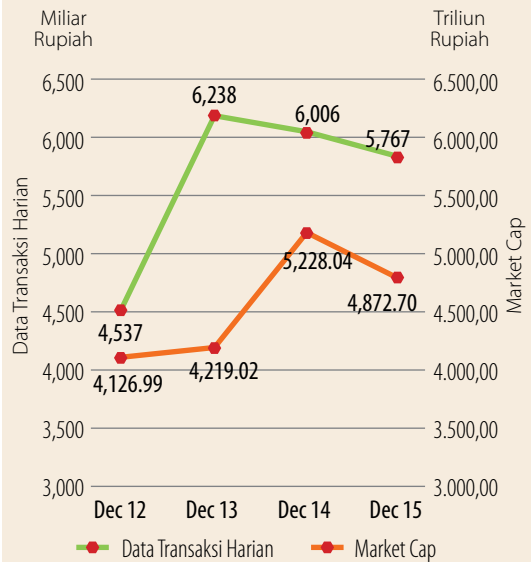
- ❖ Perkembangan Aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selama 2015 cukup baik. Sampai dengan Oktober 2015, Aset BPR tumbuh 9,7% (ytd). Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,6% dan 10,7%
- ❖ Kondisi permodalan BPR (CAR) di Indonesia sedikit mengalami penurunan pada Oktober 2015 menjadi 21,47%, lebih rendah dibandingkan akhir Desember 2014 sebesar 22,34%
- ❖ Berdasarkan sisi efisiensi, terjadi kenaikan Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) menjadi 81,91% dibandingkan akhir 2014 sebesar 80,21%

## Perkembangan IHSG

30 Desember 2014 vs 30 Desember 2015



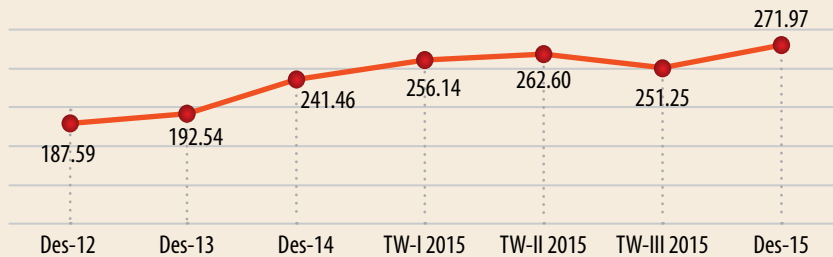
## Rata-rata Harian Transaksi dan Market Capitalization



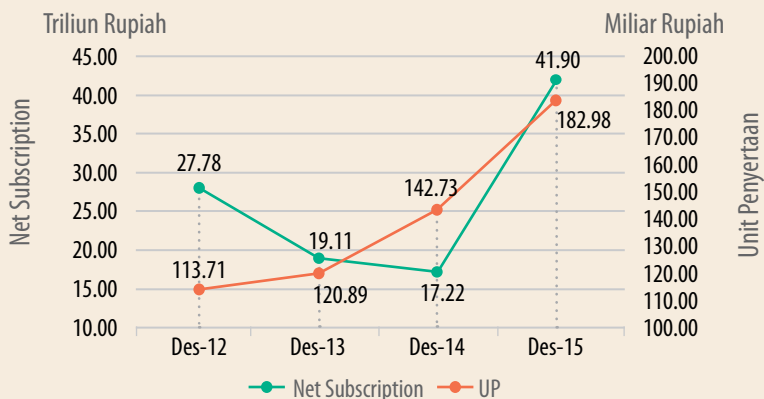
## Pertumbuhan IHSG Indonesia dan Dunia

- ❖ Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama 2015 mengalami penurunan sebesar -12,13%.
- ❖ Perlambatan perekonomian global berdampak langsung terhadap kinerja industri pasar modal. Indeks bursa global mayoritas mengalami penurunan kecuali indeks bursa di Rusia, China, Jepang dan Korea.
- ❖ Terkoreksinya IHSG juga berdampak terhadap nilai kapitalisasi saham di BEI sebesar -6,80% (turun dari Rp. 5.228,04 triliun di 2014 menjadi Rp. 4.872,70 triliun di 2015).
- ❖ Aktivitas nilai transaksi saham harian di BEI melemah sebesar 4,16% (turun dari Rp. 6,01 triliun/hari di 2014 menjadi Rp. 5,76 triliun/hari di 2015).

Perkembangan Reksa Dana Indonesia  
(dalam triliun rupiah)



Net Subscription dan Unit Penyertaan (UP)



## NAB, UP dan Net Subscription

- ❖ Nilai Aktiva Bersih / **NAB Reksa Dana meningkat 12,63%** (dari Rp241,46 triliun di 2014 menjadi Rp271,97 triliun di 2015 ini).
- ❖ Jumlah Unit Penyertaan / **UP tumbuh 28,20%** dari 142,73 miliar UP di 2014 menjadi 182,98 miliar UP di 2015 ini.
- ❖ Sejalan dengan pertumbuhan NAB dan UP tersebut, terjadi **Net Subscription lebih 2x lipat**, dari Rp17,22 triliun di 2014 menjadi Rp41,90 triliun di 2015 ini.

Jumlah dan Nilai Penawaran Umum *Initial Public Offering (IPO), Right Issue, Bond / Sukuk of Corporate* dan PUB

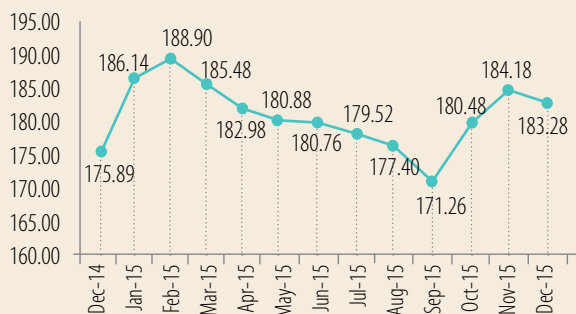
Jenis Penawaran Umum	2012		2013		2014		2015	
	Nilai (Triliun Rupiah)	Jumlah	Nilai (Triliun Rupiah)	Jumlah	Nilai (Triliun Rupiah)	Jumlah	Nilai (Triliun Rupiah)	Jumlah
<b>IPO of Shares</b>	10,35	29	16,64	30	8,30	20	11,31	16
<b>Right Issue</b>	19,75	22	40,81	31	39,76	21	42,25	19
<b>Public Offerings of Bonds/ Sukuk</b>	67,76	64	57,76	58	48,64	51	63,27	50
<b>Total</b>	<b>97,86</b>	<b>108</b>	<b>115,21</b>	<b>119</b>	<b>96,70</b>	<b>92</b>	<b>116,83</b>	<b>85</b>

### IPO Saham, *Right Issue* dan Obligasi

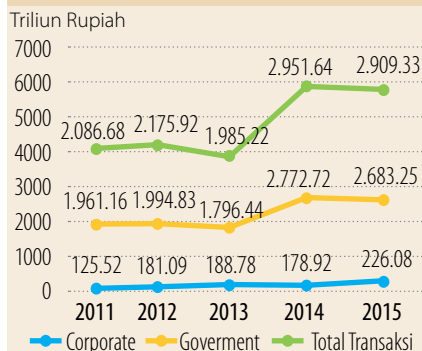
- ❖ Nilai Penawaran Umum untuk Saham Perdana, *Right Issue*, Obligasi / Sukuk Korporasi dan PUB selama 2015 mengalami peningkatan sebesar 20,82% menjadi Rp116,83 triliun jika dibandingkan dengan 2014. Namun demikian, terjadi penurunan jumlah Penawaran Umum sebesar 7,61% menjadi 85 penawaran umum.
- ❖ Selama 2015 terdapat 19 tambahan emiten baru yang terdiri dari 16 emiten saham, 2 emiten obligasi, dan 1 emiten sukuk.

## Obligasi Korporasi

### Indeks Total Return - Corporate Bond



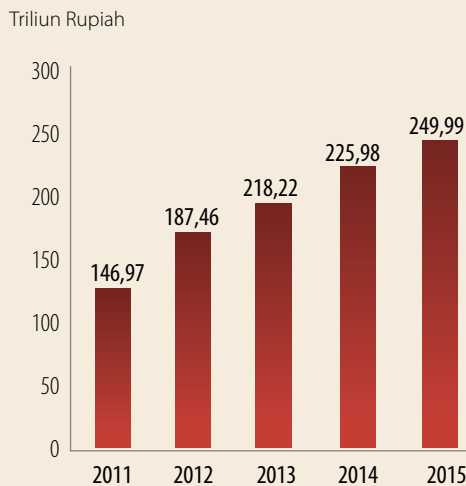
### Total Transaksi Bond (Rp Triliun)



### Obligasi Korporasi

- ❖ Jika dibandingkan dengan 2014, indeks total return Obligasi Korporasi pada 2015 meningkat sebesar 7,38 poin (4,20%). Fluktuasi indeks dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia diantaranya rencana The Fed menaikkan suku bunga.
- ❖ Nilai *outstanding* Obligasi Korporasi meningkat 9,60% jika dibandingkan dengan 2014 menjadi Rp249,99 triliun.
- ❖ Meskipun nilai transaksi obligasi korporasi sebesar Rp226,08 triliun lebih rendah dibandingkan dengan nilai transaksi SBN (*Government Bond*), namun apabila dibandingkan dengan transaksi pada 2014 nilai transaksi obligasi korporasi menunjukkan peningkatan sebesar 26,36%. Sentimen positif pada pasar obligasi masih cukup bagus yang terlihat dari data *net buy* atas total transaksi obligasi sebesar Rp144,33 triliun.

### Nilai Outstanding Obligasi Korporasi



## Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

### Total Aset (IKNB)

Dalam Triliun Rupiah

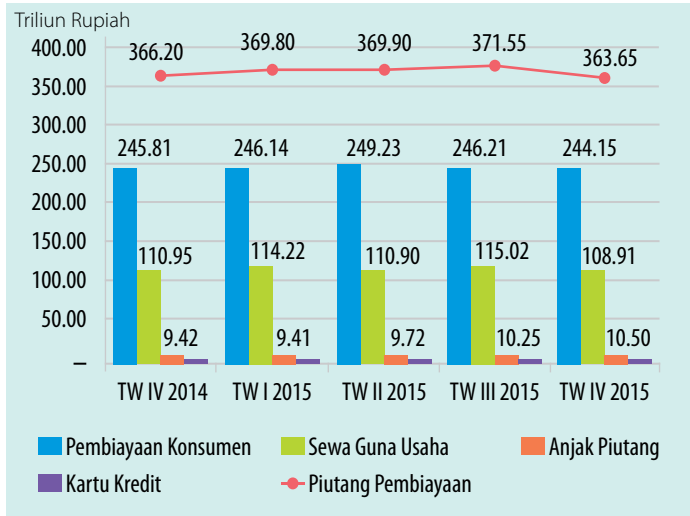
No	Industri	Desember 2014	November 2015	% Pertumbuhan (ytd)
1	Asuransi dan Reasuransi	565,33	585,90	↑ 3,64%
2	BPJS Kesehatan	16,55	17,35	↑ 4,83%
3	BPJS Ketenagakerjaan	195,92	208,12	↑ 6,23%
4	Dana Pensiun	187,70	200,70	↑ 6,93%
5	Lembaga Pembiayaan	443,74	450,81	↑ 1,59%
6	Lembaga Jasa Keuangan Keuangan Khusus	116,76	147,45	↑ 26,28%
7	Industri Jasa Penunjang	5,42	6,04	↑ 11,44%
	Total Aset	1.531,42	1.616,37	↑ 5,55%

### Pertumbuhan Aset Industri Keuangan Non Bank

- ❖ Sampai dengan November 2015, Aset IKNB meningkat sebesar 5,55% dibandingkan akhir 2014
- ❖ Peningkatan Aset IKNB terbesar adalah Lembaga Jasa Keuangan Khusus dengan peningkatan sebesar 26,28% (meningkat Rp30,69 triliun)

# Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

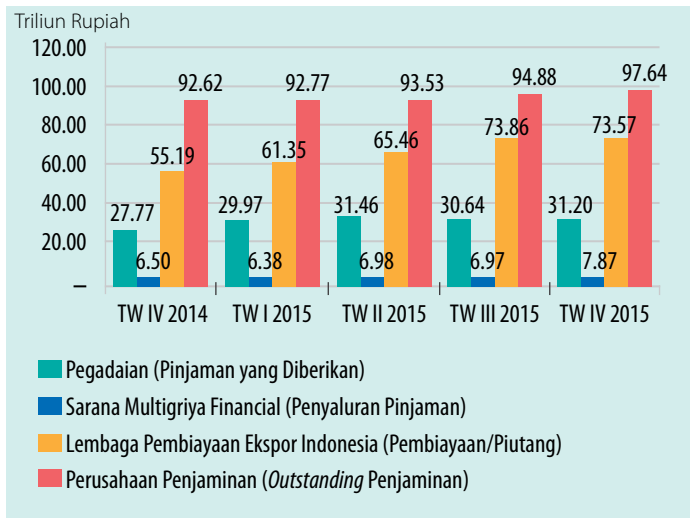
## Piutang Pembiayaan dan Komposisi Pembiayaan



## Pertumbuhan Piutang Pembiayaan dan Komposisi Pembiayaan

- ❖ Sampai dengan November 2015, terjadi penurunan pada piutang perusahaan pembiayaan sebesar -0,70% dibandingkan akhir 2014
- ❖ Komposisi piutang pembiayaan masih didominasi oleh Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha masing-masing sebesar 67,1% dan 29,9%.

## Pinjaman/Pembiayaan Industri Jasa Keuangan Khusus



## Pertumbuhan Pinjaman/Pembiayaan Industri Jasa Keuangan Khusus

- ❖ Sampai dengan November 2015, jumlah pinjaman/pembiayaan tumbuh sebesar 15,49% dibanding dengan akhir 2014.
- ❖ Pertumbuhan Tertinggi terjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor



## Kinerja Perbankan Syariah Dalam Triliun Rupiah

Indikator Utama	Desember 2014	Oktober 2015	% Pertumbuhan
<b>BUS + UUS</b>			
Total aset	272,34	276,6	↑ 1,56%
DPK	217,86	219,48	↑ 0,74%
Pembiayaan	199,33	207,77	↑ 4,23%
CAR (%)	15,74	14,96	↓ -0,78%
NPF Gross (%)	4,33	4,74	↑ 0,41%
ROA(%)	0,85	0,96	↑ 0,11%
FDR (%)	91,50	94,66	↑ 3,16%

## Perkembangan Perbankan Syariah

- ❖ Industri Perbankan Syariah selama tahun 2015 (per Oktober 2015) mengalami pertumbuhan Total Aset sebesar 1,56% (*ytd*). Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang masing-masing tercatat sebesar 0,74% dan 4,23% (*ytd*).

## Aset (IKNB Syariah) Dalam Triliun Rupiah

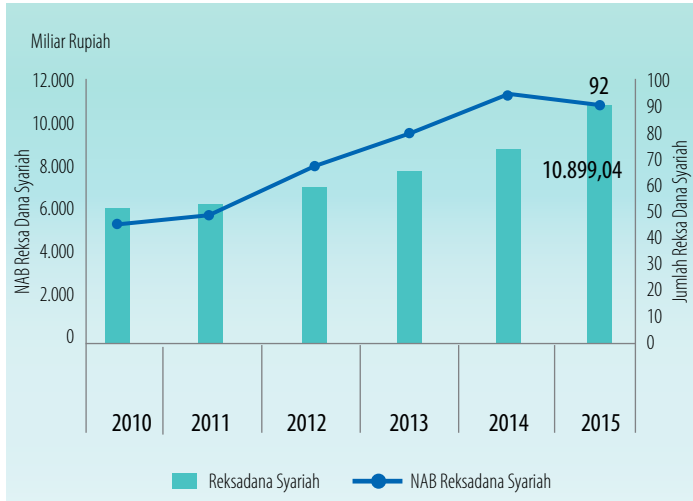
No.	Industri	Desember 2014	November 2015	% Pertumbuhan
1	Asuransi dan Reasuransi Syariah	22,36	25,40	↑ 13,58%
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	24,15	21,64	↓ -10,40%
3	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya	11,86	15,48	↑ 30,50%
<b>Total Aset</b>		<b>58,37</b>	<b>62,51</b>	<b>↑ 7,10%</b>

## Perkembangan Aset IKNB syariah

- ❖ Aset IKNB Syariah mengalami peningkatan sebesar 7,10% (November 2015).
- ❖ Peningkatan terjadi pada asuransi dan reasuransi Syariah serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah

# Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah

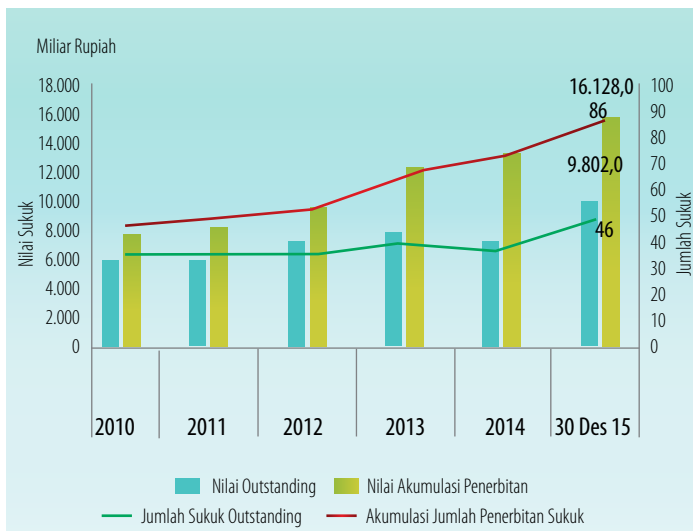
## Reksa Dana Syariah



## Perkembangan Reksa Dana Syariah

- ❖ Jumlah Reksa Dana Syariah yang mendapatkan pernyataan efektif sepanjang 2015 berjumlah 19 Reksa Dana Syariah, jumlah ini sama dengan jumlah Reksa Dana Syariah yang efektif di 2014.
- ❖ Jumlah Reksa Dana Syariah *outstanding* mengalami peningkatan dibanding akhir 2014 yakni sebesar 24,32% menjadi 92 Reksa Dana Syariah. Di sisi lain NAB Reksa Dana Syariah *outstanding* di 2015 sebesar 10,89 Triliun, mengalami penurunan sebesar 3% dibandingkan NAB 2014.

## Sukuk Korporasi



## Perkembangan Sukuk Korporasi

- ❖ Penerbitan Sukuk Korporasi sepanjang 2015 berjumlah 15 penerbitan seri sukuk atau meningkat 114,3% dibandingkan dengan 2014. Nilai penerbitan, sukuk sepanjang 2015 mencapai 3,17 triliun atau meningkat 243,66% dibandingkan 2014.
- ❖ Jumlah dan Nilai Sukuk Korporasi yang *outstanding* mengalami peningkatan dibanding akhir 2014 masing-masing sebesar 31,43% dan 37,78% menjadi 46 Sukuk Korporasi dengan nilai *outstanding* sebesar 9,80 Triliun.



Bab 3

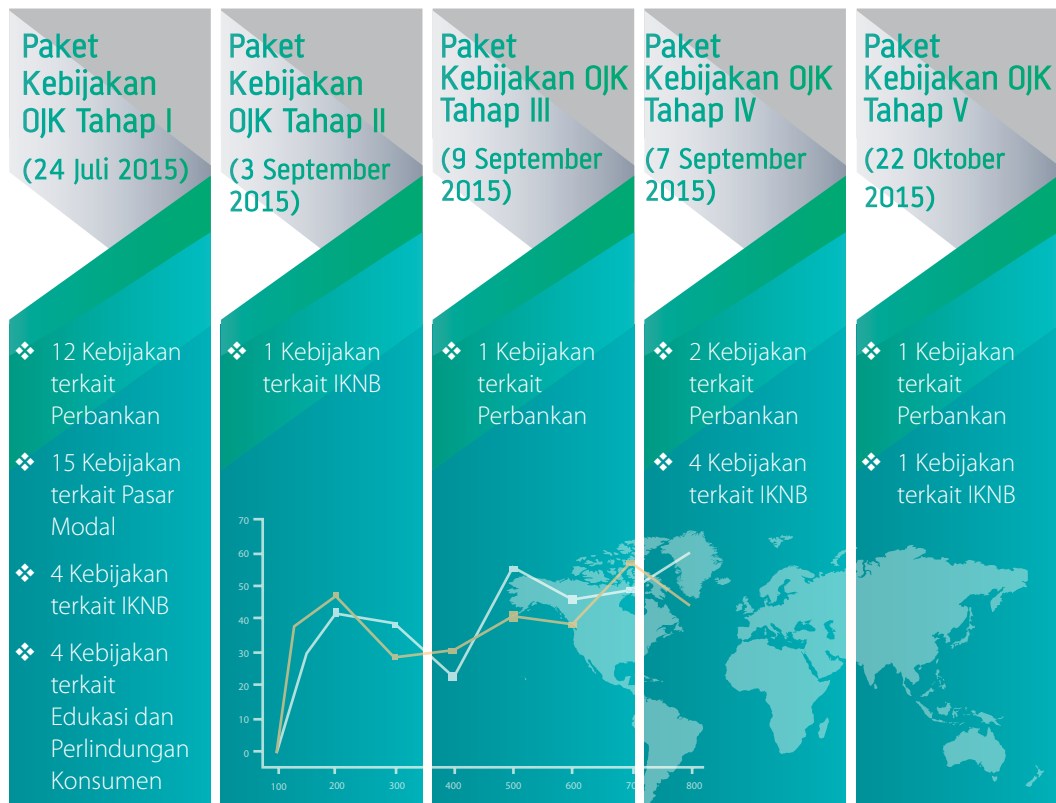
---

***Highlight Program***  
**Strategis OJK 2015**  
Untuk Pengembangan  
Sektor Jasa Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

# Paket Kebijakan OJK Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta untuk menjaga stabilitas Sektor Jasa Keuangan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang penuh gejolak, selama 2015 OJK mengeluarkan 5 paket kebijakan yang terdiri dari 45 kebijakan dengan rincian 16 Kebijakan sektor perbankan, 15 Kebijakan sektor Pasar Modal, 10 Kebijakan sektor IKNB dan 4 Kebijakan terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen



 **Sektor Perbankan (16)**

1. Tagihan atau kredit yang dijamin oleh Pemerintah Pusat dikenakan bobot risiko sebesar 0 (nol) persen dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit;
2. Bobot risiko untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) ditetapkan sebesar 75% dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit;
3. Penerapan penilaian Prospek Usaha sebagai salah satu persyaratan restrukturisasi kredit tanpa mempertimbangkan kondisi pasar maupun industri dari sektor usaha debitur;
4. Pelaksanaan restrukturisasi kredit sebelum terjadinya penurunan kualitas kredit;
5. Penurunan bobot risiko kredit beragun rumah tinggal *non program* pemerintah ditetapkan sebesar 35%, tanpa mempertimbangkan nilai *Loan To Value* (LTV) dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit;
6. Penurunan bobot risiko KPR Rumah Sehat Sejahtera (RSS) dalam rangka program Pemerintah Pusat Republik ditetapkan sebesar 20%, tanpa mempertimbangkan nilai LTV dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit;
7. Penurunan bobot risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijamin oleh Jamkrida dapat dikenakan bobot risiko sebesar 50%;
8. Penilaian kualitas kredit kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga dinaikkan dari paling tinggi Rp 1 milyar menjadi paling tinggi Rp 5 milyar hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau/ bunga;
9. Penilaian kualitas kredit kepada UMKM dengan jumlah lebih dari Rp 5 milyar yang dikaitkan dengan peringkat penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan bank;
10. Penetapan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi;
11. Penetapan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi dengan tenggat waktu pembayaran (*grace period*) pokok, selama masa *grace period*;
12. Persyaratan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan bagi bank yang melakukan penyertaan modal dalam rangka:
  - a. Pendirian perusahaan yang akan mengambil alih aset kredit bermasalah dari bank yang sama sepanjang kepemilikan bank maksimum 20% (dua puluh persen) dan tidak menjadi pengendali; atau
  - b. Tambahan penyertaan untuk penyelamatan perusahaan anak berupa bank.
13. Penyederhanaan pembukaan rekening valas oleh perorangan yang berkewarganegaraan asing.
14. Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan (*trust*) bank;
15. Penegasan implementasi *one project concept* dalam penetapan kualitas kredit;
16. Penyederhanaan peraturan dan perizinan bagi produk-produk perbankan syariah dalam rangka mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah

## Sektor Pasar Modal (15)

1. Pengembangan Infrastruktur Pasar *Repurchase Agreement* (REPO), mencakup pengaturan mengenai REPO, pengembangan produk REPO, serta layanan *settlement* transaksi REPO yang dilengkapi *monitoring* dan konsep *3rd party* REPO;
2. Pengembangan UKM untuk *Go Public*, mencakup penyusunan ketentuan untuk pengembangan UKM, serta Pembuatan papan khusus untuk UKM;
3. Penetapan *Electronic Trading Platform* (ETP), mencakup pengembangan *trading platform* surat utang terintegrasi yang digunakan oleh pelaku dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pengawasan;
4. Penggunaan Bank Sentral untuk Penyelesaian Transaksi, mencakup implementasi penggunaan Bank Sentral selain penggunaan Bank Pembayaran untuk layanan jasa penyelesaian dana di pasar modal;
5. Rencana penerbitan produk derivatif Indonesia *Government Bond Futures* (IGBF), dalam rangka pengembangan Pasar Surat Berharga Negara (SBN);
6. Pengembangan Obligasi Daerah dengan membantu Pemerintah Daerah dalam penerbitan Obligasi Daerah dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pembangunan infrastruktur;
7. Penggunaan *Bond Index* Surat Utang sebagai indikator acuan di pasar surat utang Indonesia yang digunakan secara luas oleh pelaku pasar;
8. Perluasan produk investasi di Pasar Modal melalui Penerbitan Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP), untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan perumahan di Indonesia serta membantu Lembaga Jasa Keuangan dalam memperoleh likuiditas dari pasar modal;
9. Peraturan Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dalam rangka meningkatkan jumlah pemegang izin WPPE khususnya sebagai tenaga/agen pemasaran yang diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah investor di Pasar Modal;
10. Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dalam rangka mengoptimisasi dan melakukan efisiensi atas proses transaksi dan operasional di dalam industri pengelolaan investasi;
11. Penerapan *Extensible Business Reporting Language* (XBRL) dalam rangka penyediaan informasi yang akurat dapat diandalkan, dan tersaji dalam suatu format dengan standar global.;
12. Peningkatan BUMN dan anak BUMN yang *Go Public*, dalam rangka membantu BUMN dalam penggalangan dana untuk kegiatan pengembangan usaha, sekaligus mendorong likuiditas pasar;
13. Pengembangan *Electronic Book Building*, dalam rangka meningkatkan transparansi *fairness*, dan harga terbaik dalam proses penetapan harga pada Penawaran Umum Perdana Saham secara elektronik;
14. Peraturan terkait Pasar Modal Syariah, dalam rangka memberikan relaksasi pengaturan maupun kepastian hukum terkait penerapan prinsip Syariah, Efek Syariah, dan Ahli Syariah di Pasar Modal sehingga mempunyai level of *playing field* dengan pasar modal konvensional;
15. Penerbitan Pedoman Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik, dalam rangka mendorong perusahaan untuk mempraktikkan tata kelola perusahaan yang baik;

## Sektor IKNB (10)

1. Relaksasi Kebijakan *Non Performing Financing* (NPF) Perusahaan Pembiayaan, dalam rangka mendorong pertumbuhan piutang pembiayaan oleh industri Perusahaan Pembiayaan (PP);
2. Pengembangan Asuransi Pertanian, untuk meningkatkan akses para petani ke sistem keuangan sehingga sektor pertanian nasional dapat terus tumbuh dan berkembang;
3. Pembentukan *Rating Agency* Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam rangka mengurangi isu *asymmetric information* dalam pendanaan UMKM dan menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, yang difokuskan pada upaya mendorong LKM yang belum berbadan hukum agar segera mengajukan permohonan pengukuhan menjadi LKM sesuai UU LKM.
5. Relaksasi aturan bagi perusahaan perasuransian dan dana pensiun sebagai upaya untuk mengurangi dampak gejolak dari pasar keuangan global yang mendorong nilai investasi menurun
6. Penyiapan skema asuransi pertanian;
7. Revitalisasi modal ventura;
8. Pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
9. Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
10. Perekrutan 10 juta agen asuransi dan 10.000 Sahabat Keuangan Maritim guna meningkatkan akses masyarakat kepada layanan asuransi mikro dan syariah serta memperluas jangkauan layanan keuangan pelaku industri kelautan dan perikanan.

## Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (4)

1. Peningkatan Budaya Menabung, dalam rangka mendukung peningkatan akses keuangan masyarakat;
2. Edukasi dan Akses Keuangan UMKM, dalam rangka mendorong peningkatan akses pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) kepada UMKM dan mendorong *capacity building* UMKM di bidang pengelolaan keuangan;
3. Pemberdayaan Konsumen, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan maupun LJK;
4. Pencegahan Penghimpunan Dana/Investasi Tanpa Izin, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan formal.



# Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif) adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi

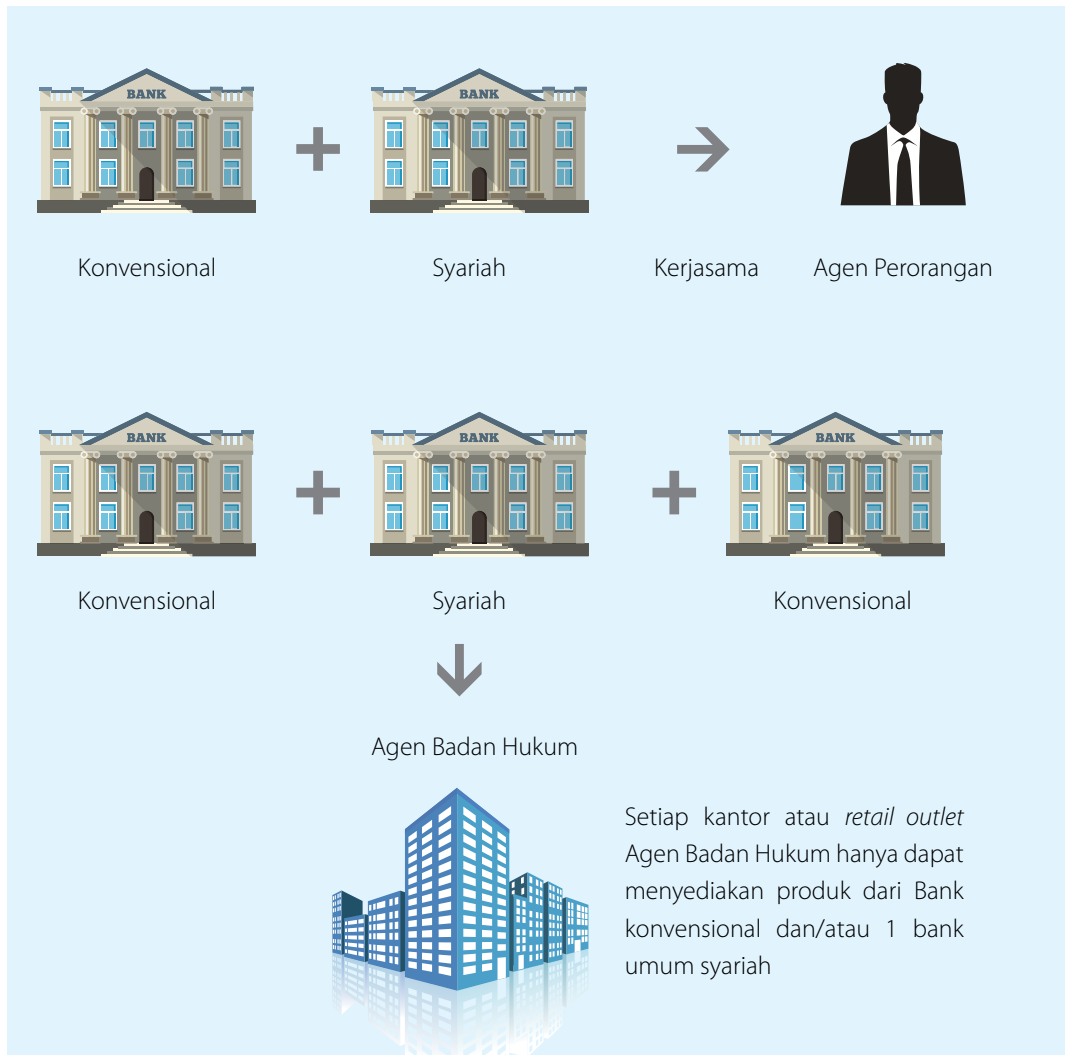
## Produk Yang Ditawarkan Pada Laku Pandai:

Tujuan dari Laku Pandai adalah untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa dan kawasan timur Indonesia dengan menyediakan akses bagi masyarakat kecil untuk dapat melakukan transaksi keuangan khususnya perbankan dimanapun berada; dan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini



# Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

## Kerjasama Bank dan Agen dalam Laku Pandai






## Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

### Data Perkembangan Laku Pandai saat ini\*:

Bank Penyelenggara Laku Pandai						
<b>Produk Tabungan</b>	Tabunganku	Tabunganmu	Tabungan WOW BSA	Tabungan Laku	Tabungan Cermat BSA	BNI Pandai
<b>Jumlah Agen</b>	14.276 Agen	1.219 Agen	8.589 Agen	16 Agen	569 Agen	226 Agen
<b>Jumlah Nasabah</b>	3.477 Nasabah	45 Nasabah	159.914 Nasabah	742 Nasabah	930.153 Nasabah	31 Nasabah
<b>Jumlah Saldo</b>	Rp1.131.262.295	Rp399.439	Rp8.495.729.678	Rp95.567.747	Rp31.609.195.172	Rp1.266.000.000

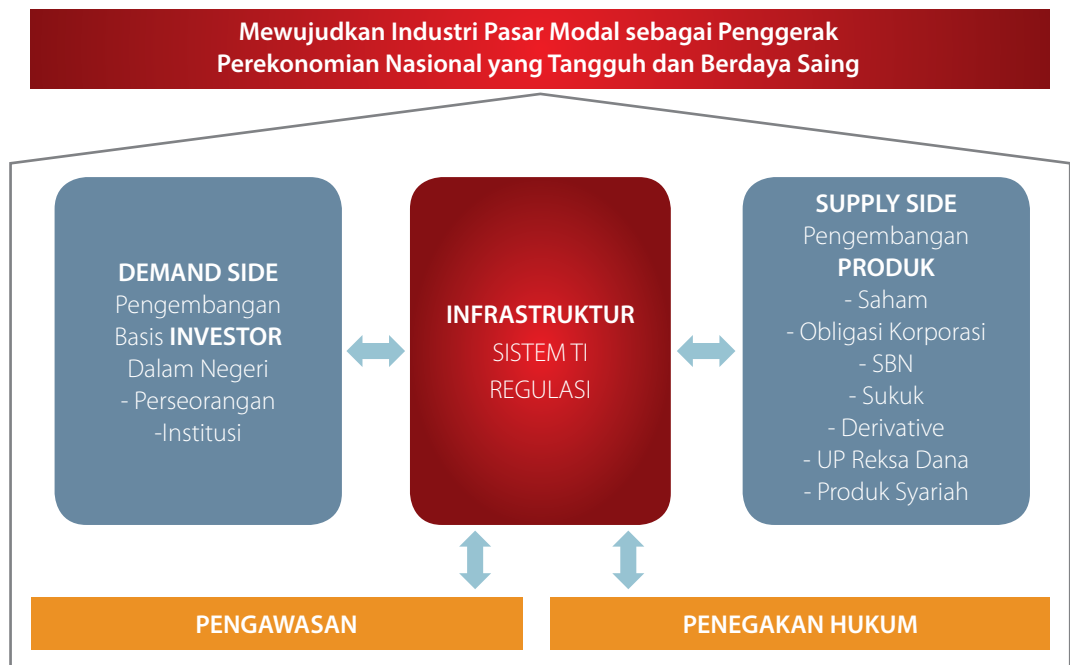
\*Perkembangan Laku Pandai s/d Oktober 2015

	<b>Total Jumlah Agen : 24.895 Agen</b>
	<b>Total Jumlah Nasabah : 1.094.362 Nasabah</b>
	<b>Total Jumlah Saldo : Rp41.333.420.331</b>

# Pendalaman Pasar (Market Deepening) Pasar Modal

Dalam rangka mewujudkan industri Pasar Modal sebagai penggerak perekonomian nasional yang berdaya saing global, OJK melaksanakan program kerja berupa pendalaman pasar. Program pendalaman pasar terdiri dari pengembangan infrastruktur baik sistem Teknologi Informasi maupun regulasi, pengembangan basis investor domestik, pengembangan produk, serta mempersiapkan perangkat pengawasan dan penegakan hukum.

## MARKET DEEPENING BUILDING BLOCKS



Implementasi kegiatan *market deepening* bertujuan mendukung peningkatan *supply* dan *demand* di Pasar Modal Indonesia yang dilaksanakan dalam enam kelompok bauran strategi pengembangan yaitu:

- Pengembangan pasar perdana;
- Pengembangan pasar sekunder;
- Pasar surat utang;
- Pasar Modal Syariah;
- Perizinan, registrasi, pelaporan, dan pengawasan elektronik;
- Kegiatan sosialisasi dan edukasi.

# Pendalaman Pasar (Market Deepening) Pasar Modal – Pengembangan Basis Investor

Sesuai dengan *Market Deepening Building Block*, untuk memperluas basis investor domestik (*Demand Side*) khususnya investor retail di tanah air, OJK berkolaborasi aktif dengan industri dalam penyelenggaraan beberapa kegiatan sosialisasi dan edukasi antara lain :



## Penyelenggaraan Pekan Reksa Dana dengan Asosiasi dan Pelaku Industri Reksa Dana

- ❖ 9 event Pekan Reksa Dana (5 Kota – Jakarta, Lampung, Medan, Yogyakarta & Batam)
- ❖ Penambahan jumlah rekening Reksa Dana sebanyak 5.545 rekening baru
- ❖ Jumlah transaksi yang dihasilkan Rp 3,39 Miliar
- ❖ Pada pekan Reksa Dana yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, telah tercipta **Rekor Muri “Penciptaan Investor Reksa Dana Syariah Terbanyak”** oleh satu Perguruan Tinggi yaitu 4.503 Investor Baru.



## Event Bersama Dengan Bursa Efek Indonesia dan Institusi Terkait

- ❖ Universitas Putra Indonesia (UPI) Padang dan Bursa Efek Indonesia (BEI) – mencetak **Rekor Muri “Penciptaan investor saham terbanyak dalam satu universitas”** – berhasil memperoleh 3000 Investor Baru.
- ❖ Universitas Negeri Semarang dan Bursa Efek Indonesia (BEI) – mencetak **Rekor Muri “Menabung saham oleh Peserta Terbanyak”** dengan 1.762 Investor.
- ❖ PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk - mencetak **Rekor Muri “Penciptaan Investor terbanyak dari Satu Perusahaan”** – berhasil memperoleh 10.000 Investor baru melalui program *Employee Stock Option Plan* (ESOP)

# Pendalaman Pasar (Market Deepening) Pasar Modal – Pengembangan Basis Investor

## Penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu 2015.

Dalam rangka peningkatan pemahaman pasar modal di kalangan masyarakat, akademisi dan pemerintah daerah, OJK juga melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) yang diselenggarakan di 6 kota (Surabaya, Purwokerto, Medan, Makasar, Samarinda, dan Bandung) dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

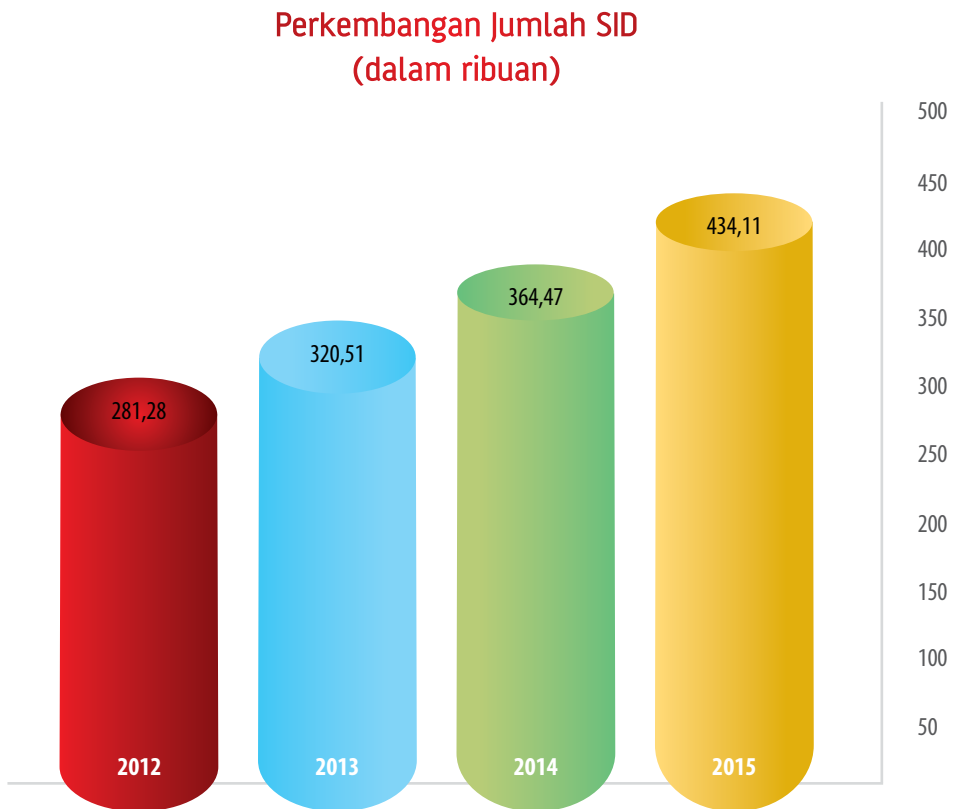
- ❖ Media Relasi berupa dialog bersama wartawan;
- ❖ Kunjungan Ke kantor Gubernur serta Sosialisasi Obligasi Daerah kepada Pemprov, Pemda, Pemkab;
- ❖ Seminar Pasar Modal dengan rangkaian tema seperti “Waspada Investasi dan Pasar Modal sebagai Pilihan Investasi”;
- ❖ Sosialisasi Peraturan OJK;
- ❖ *Talkshow* Pasar Modal di Kampus dan Universitas; dan
- ❖ Klinik Konsultasi dan Investasi.

No.	Kota Penyelenggaraan	Kegiatan	
		Seminar & Talkshow	FGD Wartawan
1	Surabaya	250	25
2	Purwokerto	300	23
3	Medan	400	40
4	Makasar	645	11
5	Samarinda	300	23
6	Bandung	500	10
Total Jumlah Peserta		2.395 Peserta	132 Wartawan



## Pendalaman Pasar (Market Deepening) Pasar Modal – Pengembangan Basis Investor

Fokus OJK dalam memperluas basis investor melalui berbagai macam kegiatan telah berhasil menambah jumlah investor, yang tercatat dalam *Single Investor Identification* (SID) menjadi **434,11 ribu investor** atau **meningkat 19,11% (69,64 ribu Investor)** dibandingkan tahun sebelumnya.



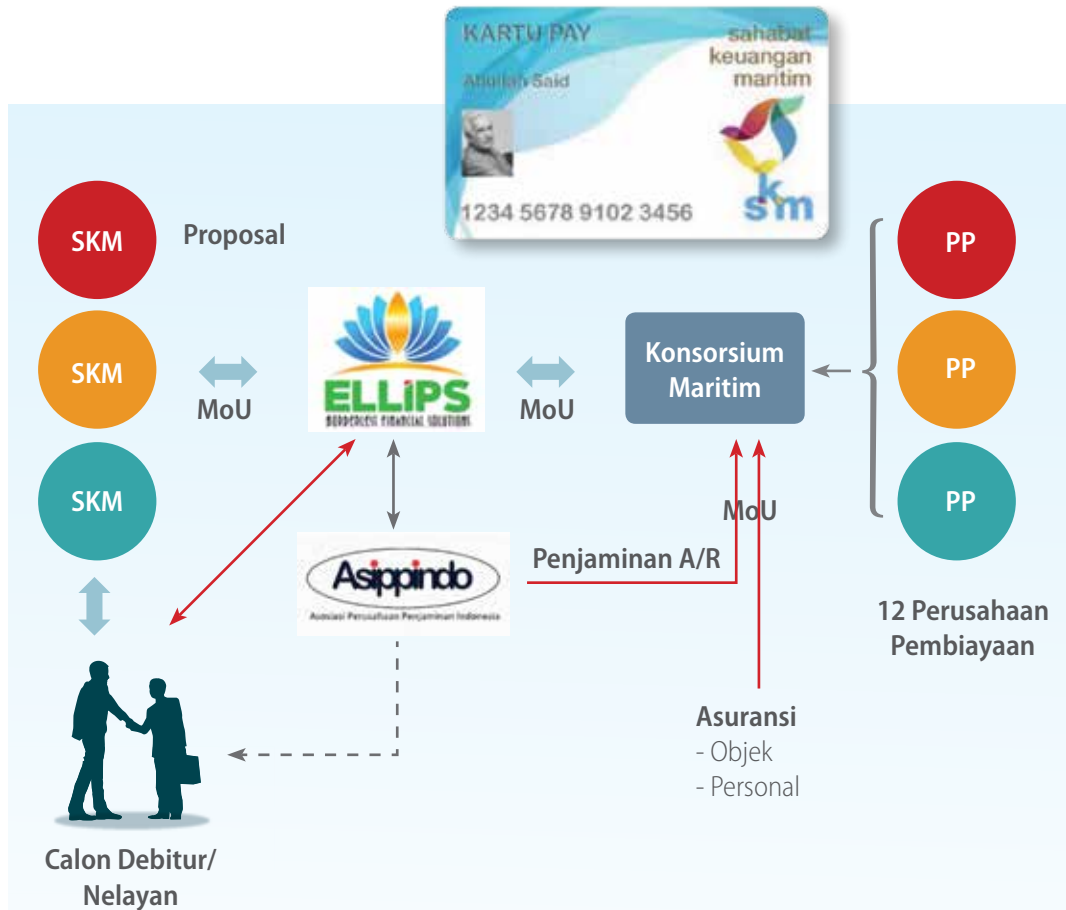
## Program Jangkau, Sinergi dan *Guideline* (Program JARING)

- ❖ Program Jaring telah diluncurkan pada 11 Mei 2015 di Desa Boddia, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
- ❖ Program JARING bertujuan menjawab kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi tentang *database* kelautan dan perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis, dan dukungan regulasi dari otoritas terkait.
- ❖ Terdapat delapan bank partner dan satu konsorsium perusahaan pembiayaan, asuransi jiwa, asuransi umum, dan penjaminan (Pokja Maritim)





## Program Jangkau, Sinergi dan *Guideline* (Program JARING)

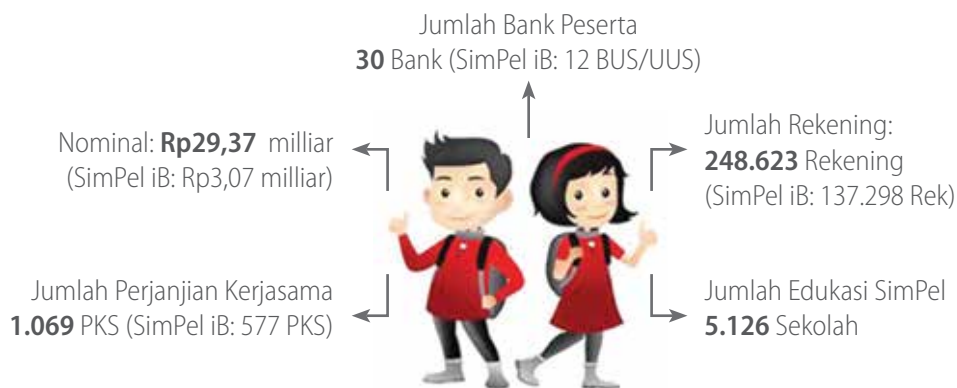


- ❖ Untuk memperluas jangkauan layanan keuangan pelaku industri kelautan dan perikanan, OJK membentuk **Sahabat Keuangan Maritim** sebagai agen untuk produk pembiayaan maritim.
- ❖ **Sahabat Keuangan Maritim** juga akan mendapatkan kartu sebagai tanda anggota yang menandakan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan pembiayaan maritim yang diadakan oleh OJK dan KKP
- ❖ Konsorsium perusahaan pembiayaan juga telah menyepakati skema pembiayaan untuk **Sahabat Keuangan Maritim**.

## Tabungan Simpel



- ❖ Sebagai salah satu bentuk implementasi program inisiatif dari SNLKI, OJK menginisiasi produk tabungan siswa, bernama Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)
- ❖ Diluncurkan pada 14 Juni 2015 oleh Presiden Joko Widodo



\*) Nominal penyaluran dana PIP melalui SimPel dan SimPel iB: 13.640 Juta

## Identifikasi Konglomerasi Keuangan

- ❖ Terdapat 50 Grup Konglomerasi Keuangan yang beroperasi di Sektor Jasa Keuangan Indonesia
- ❖ Total aset dari 50 Grup Konglomerasi Keuangan adalah sebesar Rp5.142 Triliun (70,5% dari total aset Sektor Jasa Keuangan)

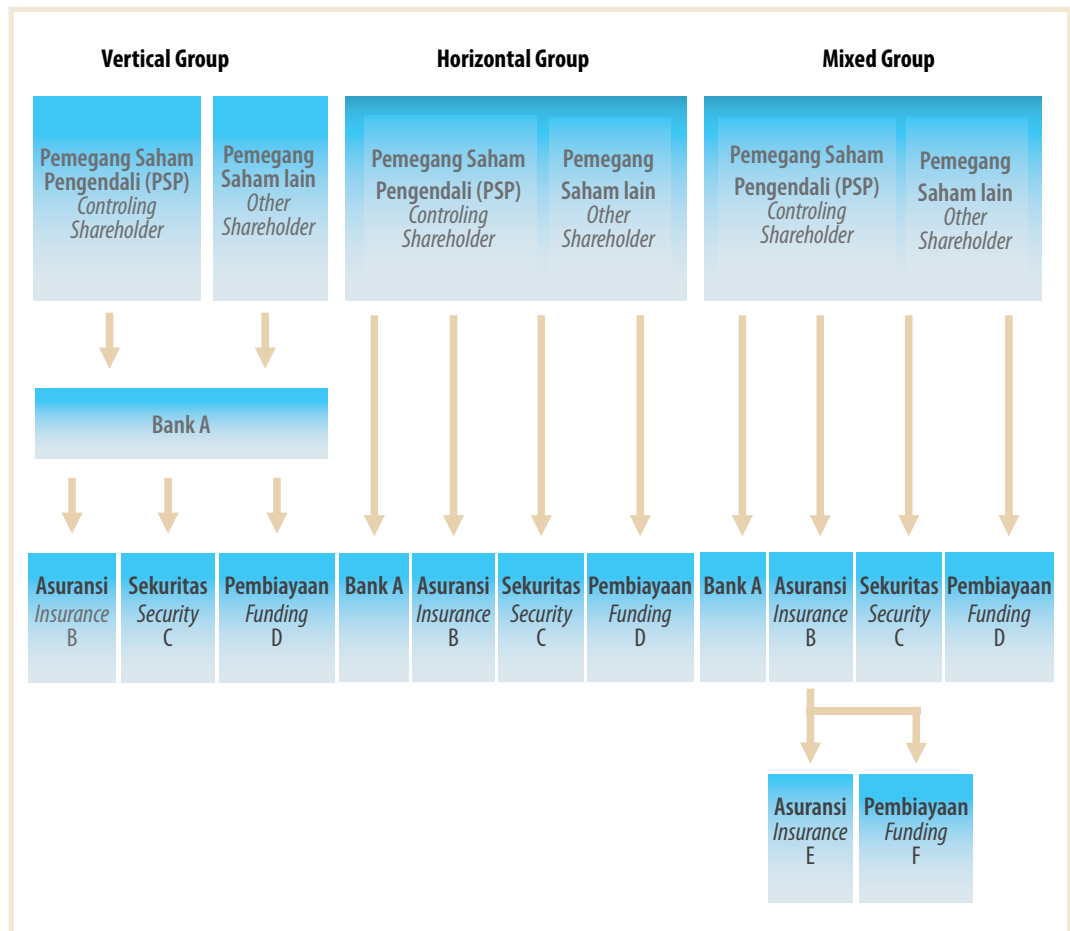
## Peraturan Pendukung

- ❖ POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- ❖ POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- ❖ SE OJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- ❖ SE OJK No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

## Infrastruktur Pengawasan

- ❖ Pembentukan Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi
- ❖ Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi
- ❖ Pelaksanaan pengawasan melalui Forum Panel Pengawasan Terintegrasi serta Forum Komunikasi dan Koordinasi Terintegrasi

## Bentuk Konglomerasi Keuangan



50 Grup Konglomerasi Keuangan yang beroperasi di Sektor Jasa Keuangan Indonesia yang terdiri dari 14 Grup Konglomerasi Keuangan yang bersifat **Vertikal**; 28 Grup Konglomerasi Keuangan yang bersifat **Horizontal**; dan 8 Grup Konglomerasi Keuangan yang bersifat **Mixed**.

## Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Dalam rangka perlindungan konsumen, khususnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, OJK mendorong pembentukan dan pengembangan LAPS di sektor jasa keuangan. Melalui asistensi, pendampingan, *recycling program* pengembangan kompetensi teknis SDM LAPS, dan penilaian menyeluruh, OJK memastikan LAPS memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas.

Sampai dengan 31 Desember 2015, Daftar LAPS telah ditetapkan untuk sektor asuransi, pasar modal, dana pensiun, perbankan, dan penjaminan yang siap melayani penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan.



Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  
**ADA LAPS, SENGKETA BERES !**

## ROADMAP Sektor Jasa Keuangan SYARIAH (2015-2019)

Roadmap Perbankan Syariah	Roadmap Pasar Modal Syariah	Roadmap IKNB Syariah
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya.</li> <li>❖ Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi.</li> <li>❖ Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan.</li> <li>❖ Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk.</li> <li>❖ Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM dan TI serta infrastruktur lainnya.</li> <li>❖ Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat.</li> <li>❖ Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Memperkuat pengaturan atas produk, lembaga, dan profesi terkait pasar modal syariah;</li> <li>❖ Meningkatkan <i>supply</i> dan <i>demand</i> produk pasar modal syariah;</li> <li>❖ Mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi informasi pasar modal syariah;</li> <li>❖ Mempromosikan dan mengedukasi pasar modal syariah; dan</li> <li>❖ Mengoordinasikan dengan pemerintah dan regulator terkait dalam rangka menciptakan sinergi kebijakan pengembangan pasar modal syariah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat terhadap IKNB Syariah secara terarah dan menyeluruh.</li> <li>❖ Memprakarsai koordinasi antar institusi dalam upaya meningkatkan peran IKNB Syariah dalam perekonomian.</li> <li>❖ Mendorong sinergi antar pelaku IKNB Syariah dan antara IKNB Syariah dengan industri keuangan syariah lainnya.</li> <li>❖ Mengembangkan jalur-jalur distribusi alternatif.</li> <li>❖ Mengembangkan produk-produk IKNB Syariah berbasis pemenuhan kebutuhan masyarakat sasaran.</li> <li>❖ Mengembangkan kebijakan insentif bagi pengembangan IKNB Syariah.</li> <li>❖ Memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional dan kapasitas bisnis.</li> <li>❖ Mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik.</li> <li>❖ Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap.</li> <li>❖ Mengembangkan sistem pelaporan dan <i>monitoring</i> yang mendukung penerapan <i>early warning system</i>.</li> <li>❖ Menerapkan ketentuan sertifikasi standar profesi para pelaku IKNB Syariah secara bertahap untuk Direksi, Komisaris, Tenaga Ahli dan Dewan Pengawas Syariah.</li> <li>❖ Mendukung kerja sama IKNB Syariah dengan instansi dan pihak terkait untuk melahirkan lebih banyak SDM profesional di bidang IKNB Syariah.</li> <li>❖ Mendorong peningkatan penerapan sistem informasi terintegrasi dalam proses bisnis IKNB Syariah.</li> <li>❖ Mendukung pengembangan infrastruktur IKNB Syariah dalam rangka menunjang proses bisnis.</li> <li>❖ Memastikan setiap pelaku IKNB Syariah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.</li> </ul>



Untuk mendukung pengembangan Sektor Jasa Keuangan syariah, OJK meluncurkan program **Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS)** yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan Syariah (IJKS). Tujuan lain dari dilaksanakannya program ini adalah untuk membangun antara lain:

**Corporate Branding**

Membangun *Corporate Branding* OJK sebagai institusi pemerintah yang mempunyai komitmen penuh dalam pengembangan keuangan syariah Indonesia.

**Program Literasi Keuangan Syariah**

*Launching* program literasi keuangan syariah yang dilaksanakan oleh perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank syariah.

**Customer Loyalty Program (Up Selling)**

Meningkatkan loyalitas nasabah keuangan syariah (*existing*) terhadap produk keuangan syariah melalui *refreshing* pengetahuan mengenai produk dan layanan keuangan syariah.

Halaman ini sengaja dikosongkan





Bab 4

---

***Highlight Program  
Strategis OJK 2015***  
Untuk Peningkatan  
Kapabilitas Organisasi

Halaman ini sengaja dikosongkan



#### A. Program Pengendalian Gratifikasi

1. Gratifikasi sebagai pintu masuk korupsi perlu dikendalikan.
2. Program pengendalian gratifikasi adalah program nasional yang dikoordinasikan KPK.
3. Memastikan penerapan *code of conduct* yang mengatur *do's and don't's* perilaku seluruh jajaran OJK

#### B. Fungsi Anti Fraud OJK

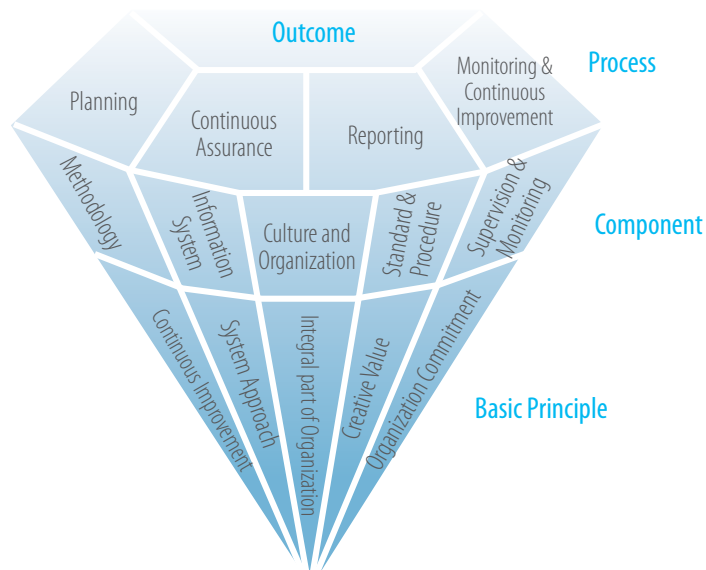
1. Unit pengelola fungsi edukasi, penyusunan strategi, pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud.
2. Koordinasi pengendalian gratifikasi, *monitoring* LHKPN, *data analytic*, dan penuntasan tindaklanjut WBS

#### C. Revitalisasi Whistle Blowing System (WBS)

1. Peningkatan efektifitas pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya.
2. Optimalisasi penggunaan WBS OJK oleh *stakeholder*.

Tahun 2015 sebagai Tahun Penguatan Integritas

# Pelaksanaan Combined Assurance



- ❖ *Combined Assurance (CA)* adalah proses yang dilaksanakan oleh seluruh penyedia *assurans* secara sinergis melalui pendekatan yang sistematis dan menyeluruh (*combined*).
- ❖ CA berfungsi untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses tata kelola, manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan kepatuhan (*compliance*) demi pencapaian visi dan misi OJK

## Penerapan Combined Assurance 2013-2017

2013	2014	2015	2016	2017
<b>Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur CA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi Literatur dan <i>Benchmarking</i> konsep <i>Combined Assurance</i></li> <li>• Komitmen Pimpinan OJK menerapkan CA OJK</li> </ul>	<b>Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur CA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Task Force CA OJK</li> <li>• FGD dengan Beberapa Universitas</li> <li>• <i>Benchmarking</i> Beberapa Negara</li> </ul>	<b>Inisiasi Implementasi CA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian yang diperlukan</li> <li>• Maturitas penyedia asuransi</li> <li>• Penguatan 1<sup>st</sup> lines dan Edukasi kepada <i>stakeholders</i></li> </ul>	<b>Implementasi Penuh CA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CA OJK akan dijalankan secara penuh</li> <li>• perencanaan di level OJK dan <i>Risk Profile</i>; <i>CA Matrix Plan</i>; dan Laporan CA</li> <li>• Penguatan 1<sup>st</sup> lines dan Edukasi kepada <i>stakeholders</i></li> </ul>	<b>Peningkatan CA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Role Model</i> Implementasi CA di IJK</li> <li>• Peningkatan <i>Skill</i>, Kompetensi dan Sistem</li> <li>• <i>Asesmen</i> oleh pihak eksternal <i>Review</i></li> <li>• Pencapaian Tingkat Maturitas 1<sup>st</sup> lines dan Edukasi kepada <i>stakeholders</i></li> </ul>

## Pengembangan Infrastruktur – Kantor OJK

Untuk mendukung fungsi pengawasan Sektor Jasa Keuangan di daerah, OJK telah memiliki 8 kantor operasional yang mandiri. Adapun kota-kota yang sudah memiliki kantor sendiri antara lain :

1. Kupang
2. Tegal
3. Purwokerto
4. Palangkaraya
5. Ambon
6. Yogyakarta
7. Kediri
8. Lampung

Selain itu, terdapat 17 kantor yang telah dilakukan proses sewa dan sedang dalam proses penataan. Kantor-kantor tersebut diharapkan akan bisa beroperasi di 2016. Lokasi dari 17 kantor tersebut antara lain Kendari, Solo, Tasikmalaya, Jember, Bengkulu, Makassar, Papua, Palu, Bali, Banjarmasin, Bandung, Jambi, Batam, Banda Aceh, Semarang, Palembang, dan Surabaya.



## Pengembangan Infrastruktur TI

Untuk mendukung OJK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selama 2015 OJK telah mengembangkan infrastruktur pendukung baik aplikasi maupun pengembangan jaringan TI di Kantor Pusat maupun Kantor Regional dan Kantor OJK. Aplikasi yang dikembangkan antara lain:

- *Whistle Blowing System* (WBS)
- Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA)
- Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEDULI)
- Pengembangan *Financial Costumer Care* (FCC)
- Sistem *Monitoring* Data Industri Jasa Keuangan (SIKARIN)
- Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO)
- Sistem Pengelolaan Kinerja Individu (SIMPEL Modul IKI)
- Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)
- Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)
- Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan (SIPP)
- Sistem Pemantauan Transaksi Efek (*Market Surveillance* – SIPETRO)
- Sistem Informasi Investigasi Perbankan



### Pengembangan Sumber Daya Manusia – OJK Institute

*OJK Institute* merupakan transformasi dari unit *learning center* di OJK yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan potensi SDM OJK baik kompetensi teknis maupun kemampuan kepemimpinan yang profesional dan handal serta membangun masyarakat keuangan Indonesia yang lebih baik. Pembangunan *OJK University* dilakukan secara bertahap sesuai dengan *blueprint* dari 2015 sampai dengan 2017. Beberapa fungsi yang akan dilakukan oleh *OJK University* antara lain:

- ❖ **Learning Center**, merupakan fungsi yang memfasilitasi peningkatan kompetensi dan pengembangan potensi SDM OJK serta pengembangan pemahaman *stakeholder* OJK sebagai bagian *recycling* program OJK.
- ❖ **Assessment Center**, merupakan fungsi yang memfasilitasi pelaksanaan asesmen untuk SDM OJK melalui metode *assessment center*.
- ❖ **Talent Pool**, merupakan fungsi yang memfasilitasi pengelolaan sumber daya manusia dalam talent pool secara fokus dan terencana sehingga bisa memenuhi kebutuhan pengembangan peserta *talent pool*.
- ❖ **Research Center**, merupakan fungsi yang memfasilitasi pelaksanaan kajian dan penelitian sesuai kebutuhan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK.
- ❖ **Financial Library**, merupakan fungsi yang memfasilitasi penyediaan referensi serta buku yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas, penyusunan kajian dan penelitian serta pengembangan pegawai.
- ❖ **Museum**, merupakan fungsi yang memfasilitasi pendokumentasian perjalanan OJK serta memberikan edukasi kepada pihak internal dan eksternal OJK.



Dalam rangka mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, *sustainable*, dan stabil, selama 2015 OJK telah melakukan 8 penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian maupun Lembaga Pemerintahan

1. MoU OJK dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
2. MOU OJK dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
3. MoU OJK dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
4. MoU OJK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
5. MoU OJK dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
6. MoU OJK dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)
7. MoU OJK dengan Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas (Perbanas Institute)
8. MoU OJK dengan Universitas Padjajaran



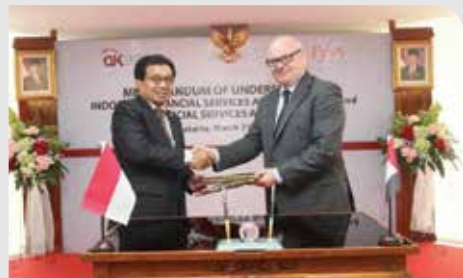


Selama 2015, OJK telah melakukan kerjasama dengan otoritas pengawas regulator industri jasa keuangan maupun lembaga internasional lainnya, antara lain:

- ❖ MoU OJK dan The Dubai Financial Services Authority
- ❖ MoU OJK dan Korea Financial Services Commission dan Korea Financial Supervisory Services
- ❖ MoU OJK dan China Banking Regulatory Commission (CBRC)
- ❖ MoU OJK dan Toronto Centre
- ❖ MoU OJK dan Islamic Development Bank (IDB)
- ❖ International Associations of Insurance Supervisors (IAIS)
- ❖ International Organisation of Pension Supervisors (IOPS)
- ❖ International Network on Financial Education (INFE)
- ❖ International Islamic Financial Market (IIFM)
- ❖ The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions(AAOIFI)
- ❖ International Capital Market Association (ICMA)

OJK juga telah menjadi anggota dari berbagai internasional *standard setting bodies*, antara lain:

- ❖ International Financial Consumer Protection (FinCoNet)
- ❖ Islamic Financial Services Board (IFSB)
- ❖ ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI)
- ❖ ASEAN Insurance Regulators Meeting
- ❖ International Financial Reporting Standards (IFRS)
- ❖ International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)





**ASEAN  
Economic  
Community**

### Peranan OJK dalam Peningkatan Kesiapan Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

- ❖ Dalam rangka implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, OJK berpartisipasi secara aktif pada berbagai fora ASEAN, antara lain *ASEAN Capital Market Forum*, *ASEAN Working Committee on Financial Services Liberalisation*, *Working Committee on Capital Market Development*, *ASEAN Insurance Regulators Meeting*, *ASEAN Banking Integration Framework Task Force*, dan *ASEAN Working Committee on Financial Inclusion*.
- ❖ OJK aktif mengundang partisipasi Sektor Jasa Keuangan untuk mengetahui lebih dalam mengenai peluang dan tantangan MEA, melalui pelaksanaan OJK Forum 2015 “Peluang dan Tantangan Industri Jasa Keuangan Indonesia dalam menghadapi MEA”, serta berbagai *Focus Group Discussion* dengan para pelaku industri.
- ❖ *Bilateral Agreement* akan dilaksanakan dengan Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand, yang akan menjadi dasar bagi negosiasi bilateral selanjutnya dalam kerangka *ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF), untuk memperluas akses pasar dan keleluasan operasi bank-bank di kedua yurisdiksi dalam rangka mendukung implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.



Bab 5

---

**Pelaksanaan  
Tugas Pokok OJK  
2015**

Halaman ini sengaja dikosongkan

Selama tahun 2015, OJK telah mengeluarkan 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk mengatur Sektor Jasa Keuangan di Indonesia serta pengaturan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berikut detail peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **Penyidikan**

1. POJK Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

### **Perbankan**

1. POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
2. POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
3. POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
4. POJK Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank
5. POJK Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum
6. POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
7. POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
8. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
9. POJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
10. POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
11. POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (*Trust*)
12. POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum
13. POJK Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
15. POJK Nomor 46/POJK.03/2015 tentang Penerapan *Systematically Important Bank* Dan *Capital Surcharge*

## **Pasar Modal**

1. POJK Nomor 7/POJK.04/2015 tentang Perubahan POJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan
2. POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
3. POJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan.
4. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
5. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal
6. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
7. POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
8. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah
9. POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Syariah
10. POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
11. POJK Nomor 29/POJK.04/2015 tentang Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman
12. POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
13. POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik
14. POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
15. POJK Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

16. POJK Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi
17. POJK Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian NAB Reksa Dana Terbuka
18. POJK Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan reksa Dana Indeks
19. POJK Nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek
20. POJK Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
21. POJK Nomor 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek
22. POJK Nomor 52/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perjanjian Pemeringkatan
23. POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
24. POJK Nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela
25. POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Emiten atau Perusahaan Publik
26. POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
27. POJK Nomor 57/POJK.04/2015 tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek
28. POJK Nomor 58/POJK.04/2015 tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Perusahaan Pemeringkat Efek
29. POJK Nomor 59/POJK.04/2015 tentang Publikasi Oleh Perusahaan Pemeringkat Efek
30. POJK Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu

### **IKNB**

1. POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
2. POJK Nomor 2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor
3. POJK Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun
4. POJK Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri.
5. POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
6. POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah
7. POJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura
8. POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura
9. POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura
10. POJK Nomor 37/POJK.05/2015 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura
11. POJK Nomor 38/POJK.05/2015 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non Bank
12. POJK Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non Bank
13. POJK Nomor 40/POJK.05/2015 Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
14. POJK Nomor 41/POJK.05/2015 Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan
15. POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
16. POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro



## Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat

### 1. Yuk SiKAPI



OJK mengembangkan program inklusi keuangan bagi ibu rumah tangga yang bernama “Yuk SiKAPI”. *Pilot project* Yuk SiKAPI dilaksanakan di Surabaya pada ibu rumah tangga pahlawan ekonomi dengan jumlah yang terdaftar untuk mendapatkan *broadcast* SMS sejumlah 620 ibu rumah tangga, sedangkan pengguna aplikasi Yuk SiKAPI pada *mobile phone* sebanyak 820 pengguna. Tingkat literasi peserta *pilot project* di Surabaya pada awal program adalah sebesar 15% dengan tingkat inklusi sebesar 18 orang. Pada akhir program, tingkat literasi adalah sebesar 45% dengan jumlah peserta yang menggunakan produk dan jasa keuangan sebesar 197 orang.

*Pilot project* kedua Yuk SiKAPI dilakukan terhadap komunitas ibu rumah tangga pengrajin gerabah di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur yaitu Desa Masbagik Timur dan Desa Banyumulek. Jumlah pengguna Yuk SiKAPI pada *pilot project* kedua yaitu sebanyak 860 ibu rumah tangga. Adapun tingkat literasi peserta *pilot project* di Lombok pada awal program adalah sebesar 38,97% dengan tingkat inklusi sebanyak 215 orang. Pada akhir program, tingkat literasi sebesar 57,04% dengan jumlah peserta yang menggunakan produk dan jasa keuangan sebesar 340 orang.

## 2. Layanan Keuangan Mikro



Merupakan suatu **layanan terpadu** dengan proses yang **sederhana, cepat, akses mudah** dan **harga terjangkau** yang terdiri dari :

1. Layanan SiPINTAR,
2. Produk dan Jasa Keuangan Mikro,
3. Layanan Edukasi dan Konsultasi.

**Layanan SiPINTAR** adalah suatu layanan keuangan mikro terpadu yang terdiri atas produk Simpanan, Investasi dan Asuransi Mikro.

**Layanan SiPINTAR** dapat menjual paket layanan 2 produk atau lebih sesuai dengan ketentuan Bank Penyelenggara Laku Mikro.

### Perkembangan Laku Mikro

#### 1. Pelaksanaan Laku Mikro

- Peluncuran Laku Mikro dilaksanakan di Karangsong pada tanggal 18 Desember 2014.
- *Pilot project* program Laku Mikro dilakukan selama 6 bulan dimulai sejak diluncurkan.
- Terdapat 11 LJK yang menjadi *entry gate* dan 14 mitra bisnis

#### 2. Produk Mikro dan SiPINTAR

- Total Rekening SiPINTAR: 2.925
- Total Nominal SiPINTAR: 1,72 M.
- Produk Mikro yang dijual dalam Laku Mikro antara lain Tabungan Mikro, Kredit Mikro, Reksadana Mikro dan Emas Mikro

#### 3. Pelaksanaan ToT

- Telah dilakukan oleh 10 LJK.
- TOT sudah dilaksanakan sebanyak 30 kali
- Jumlah peserta TOT dari seluruh LJK adalah sekitar 730 orang.

#### 4. Lokasi Laku Mikro

- Laku Mikro telah berjalan di 528 outlet dari 11 LJK di seluruh Indonesia.



### 3. Pusat Edukasi, Layanan Konsumen & Akses Keuangan UMKM



#### EDUKASI KEUANGAN

- Menyusun program & melaksanakan edukasi keuangan
- Memastikan ketersediaan informasi dan edukasi
- Operasionalisasi SiMOLEK



#### LAYANAN KONSUMEN

- Menerima Informasi
- Menjawab pertanyaan
- Penanganan Pengaduan
- Mengarahkan penggunaan LAPS



#### AKSES KEUANGAN UMKM

- Edukasi khusus dalam rangka pemberdayaan UMKM
- Memfasilitasi akses pembiayaan UMKM

## 4. Materi Edukasi Formal dan Non Formal

OJK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta industri jasa keuangan menyusun Buku Mengetahui Jasa Keuangan tingkat SMP serta tingkat SD. OJK juga menyusun materi edukasi keuangan non-formal seperti Buku Perencanaan Keuangan Keluarga, Buku Kewirausahaan, Booklet Profesi di Lembaga Jasa Keuangan, Brosur Waspada Investasi dan *Internet Banking/Mobile Banking*, Brosur FAQ Perbankan, dan Brosur Bijak Ber-e-banking



## 5. Pasar Keuangan Rakyat

OJK menyelenggarakan PKR di Pasar Tambah Rejo, Surabaya dengan target masyarakat umum, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Kegiatan perluasan akses keuangan masyarakat dikunjungi oleh 23.324 orang dengan jumlah transaksi sebesar Rp5,058 miliar. Kegiatan ini melibatkan industri jasa keuangan dengan pemasangan 193 booth yang terdiri dari 62 booth perbankan, 24 booth pasar modal, 57 booth perasuransian, 36 booth pembiayaan, 7 booth dana pensiun dan 7 booth pegadaian. Selain itu, PKR juga melibatkan 45 booth institusi dan asosiasi, meliputi 5 booth LAPS, 9 booth Asosiasi, 1 booth Jamkrindo, 5 booth Bursa Efek Indonesia, 13 booth UMKM, 5 booth Bank Indonesia, 1 booth Ikatan Bankir Indonesia dan 6 booth OJK.



## 6. Kampanye Nasional Literasi Keuangan



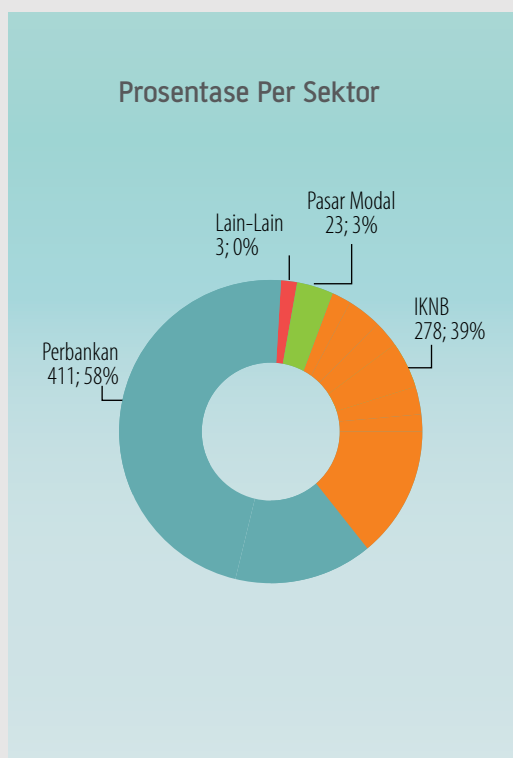
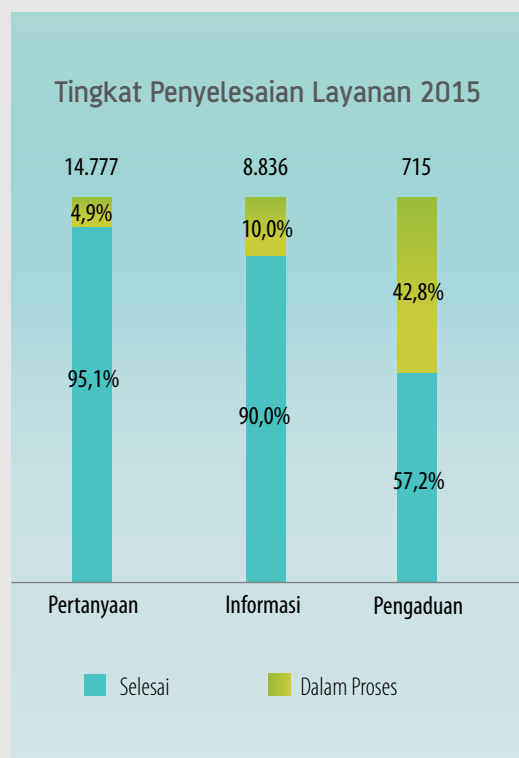
Operasionalisasi 41 armada SiMOLEK merupakan salah satu upaya menjaga kesinambungan kampanye nasional literasi dan *awareness* masyarakat mengenai PUJK serta produk dan jasa keuangan. Selama 2015, durasi penggunaan SiMOLEK secara aktif 2-4 minggu per-asosiasi/LJK, dengan total jumlah pengunjung sebanyak 37.608 orang di 779 lokasi. SiMOLEK tersebut telah dilengkapi tambahan materi berupa majalah edukasi, brosur industri jasa keuangan, pengelolaan keuangan dan seri literasi keuangan.

## 7. Edukasi Komunitas



OJK melakukan edukasi keuangan secara berkesinambungan melalui *outreach program*, *training for trainer* (ToT), Edukasi TKI, FGD Investasi Ilegal, Edukasi Komunitas, Regulator Mengajar, Edukasi Wartawan, Safari Ramadhan, Edukasi Bahari, dan Kerjasama Internal dan Eksternal. Peserta edukasi antara lain UMKM, Ibu Rumah Tangga, Pelajar dan Mahasiswa, Akademisi, Profesi (PNS dan Pedagang), Penyuluh (Pertanian, Perikanan, Kelautan, Kehutanan, KUA dan Keluarga Berencana), Pemda dan Perangkat Desa, TKI dan Keluarga TKI, Redaksi dan Wartawan, serta Komunitas Organisasi

Sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen, OJK menyediakan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care – FCC*) melalui 3 bentuk layanan. Selama 2015, FCC OJK memberikan 24.328 layanan kepada konsumen dan masyarakat, yang didominasi oleh layanan pemberian informasi (pertanyaan) sebanyak 14.777 pertanyaan, diikuti oleh penerimaan informasi (laporan) sebanyak 8.836 informasi, dan layanan pengaduan sebanyak 715 pengaduan. Pengaduan didominasi oleh sektor perbankan, terutama terkait dengan kredit dan diikuti dengan sektor IKNB, khususnya terkait perasuransian dan pembiayaan.





Bab 6

---

Forum Koordinasi  
**Stabilitas Sistem  
Keuangan** (FKSSK)

Halaman ini sengaja dikosongkan





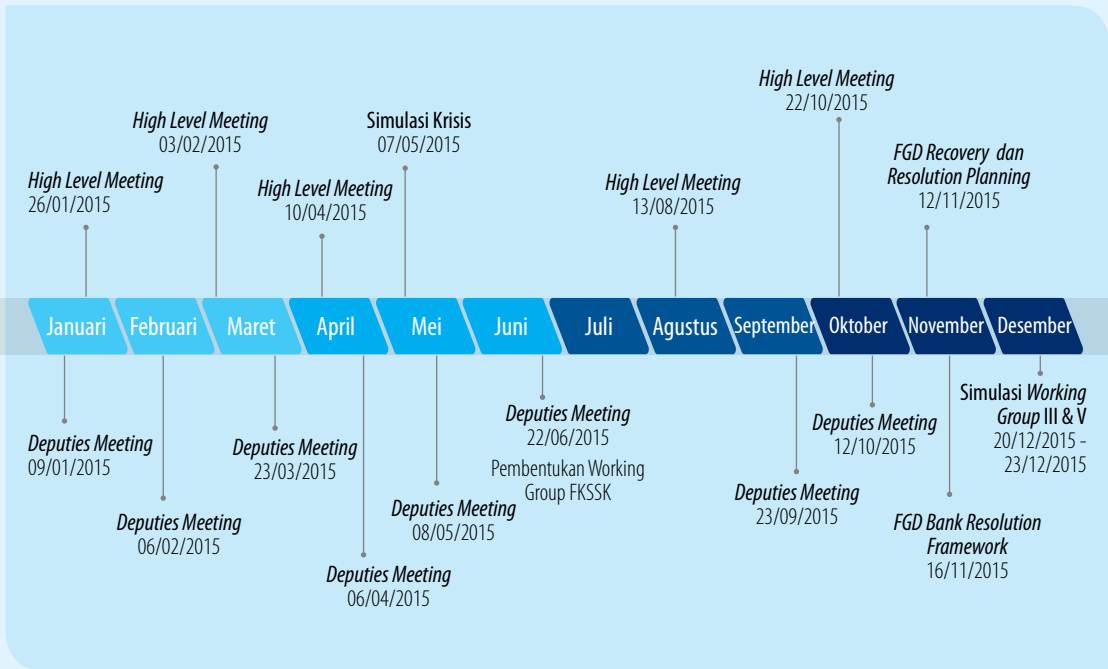
## Manajemen Krisis

- ❖ OJK telah menyelesaikan revisi Protokol Manajemen Krisis (PMK) yang menjadi payung hukum bagi internal organisasi dalam rangka pencegahan dan penanganan kondisi tidak normal. Peraturan baru ini disesuaikan dengan perkembangan terkini dan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
- ❖ Sebagai petunjuk pelaksanaan peraturan internal tentang Protokol Manajemen Krisis tersebut, telah ditetapkan *Crisis Binder* dengan cakupan OJK-Wide serta penetapan *Crisis Binder* pada masing-masing bidang pengawasan (Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB).



## Koordinasi dalam Kerangka FKSSK

- ❖ Sepanjang 2015, FKSSK telah menyelenggarakan Rapat FKSSK (*High-Level Meeting*) sebanyak lima kali. Selain itu, telah diselenggarakan pula delapan kali Rapat Koordinasi Tingkat Deputi (*Deputies Meeting*), dua kali Simulasi Krisis, dan dua kali FGD.



## Koordinasi dalam Kerangka FKSSK

- ❖ Salah satu program FKSSK yang sudah dilaksanakan adalah pembahasan RUU JPSK yang sudah masuk prolegnas DPR 2015-2019. Tindak lanjut pembahasan RUU JPSK, telah dibentuk lima *working group* FKSSK yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing institusi anggota FKSSK dengan tujuan mengoordinasikan kegiatan penyusunan panduan pelaksanaan penanganan gangguan SSK yang difokuskan pada topik-topik tertentu.



<b>Working Group</b>	<b>Fokus Penanganan</b>
<i>Working Group I</i>	Penentuan Indikator Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan
<i>Working Group II</i>	Pemantauan dan Pelaporan Stabilitas Sistem Keuangan
<i>Working Group III</i>	<i>International Financial Safety Net (IFSN)</i>
<i>Working Group IV</i>	Resolusi Bank
<i>Working Group V</i>	<i>Crisis Binder</i>

Halaman ini sengaja dikosongkan




Bab 7


---

**Manajemen Strategi,  
Anggaran dan  
Kinerja (MSAK)**


Halaman ini sengaja dikosongkan




OJK telah memiliki sistem/mekanisme manajemen strategi yang mengacu pada sistem *Balanced Scorecard*



Sistem *Balanced Scorecard* tersebut diaplikasikan didalam OJK melalui Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (Sistem MSAK) yang mengatur Manajemen Strategi, Manajemen Anggaran dan Manajemen Kinerja



Untuk melaksanakan sistem MSAK dengan baik melalui pelaksanaan pengelolaan kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, OJK telah memiliki sistem pengelolaan kinerja yang komprehensif yaitu SIMPEL OJK



Sistem pengelolaan kinerja telah dihubungkan dengan penilaian kinerja individual pegawai dan mempengaruhi renumerasi dan insentif pegawai

**Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja yang selanjutnya disingkat Sistem MSAK adalah suatu sistem yang mengintegrasikan:**



**Manajemen Strategi**, yang terdiri dari perumusan, operasionalisasi, pelaksanaan dan monitoring, serta evaluasi pelaksanaan strategi



**Manajemen Anggaran**, yaitu rencana keuangan yang disusun berdasarkan kegiatan dan rencana kerja sebagai penjabaran strategi, yang terdiri dari penyusunan pagu indikatif, penyusunan dan pangajuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ke DPR, dan monitoring serta evaluasi RKA

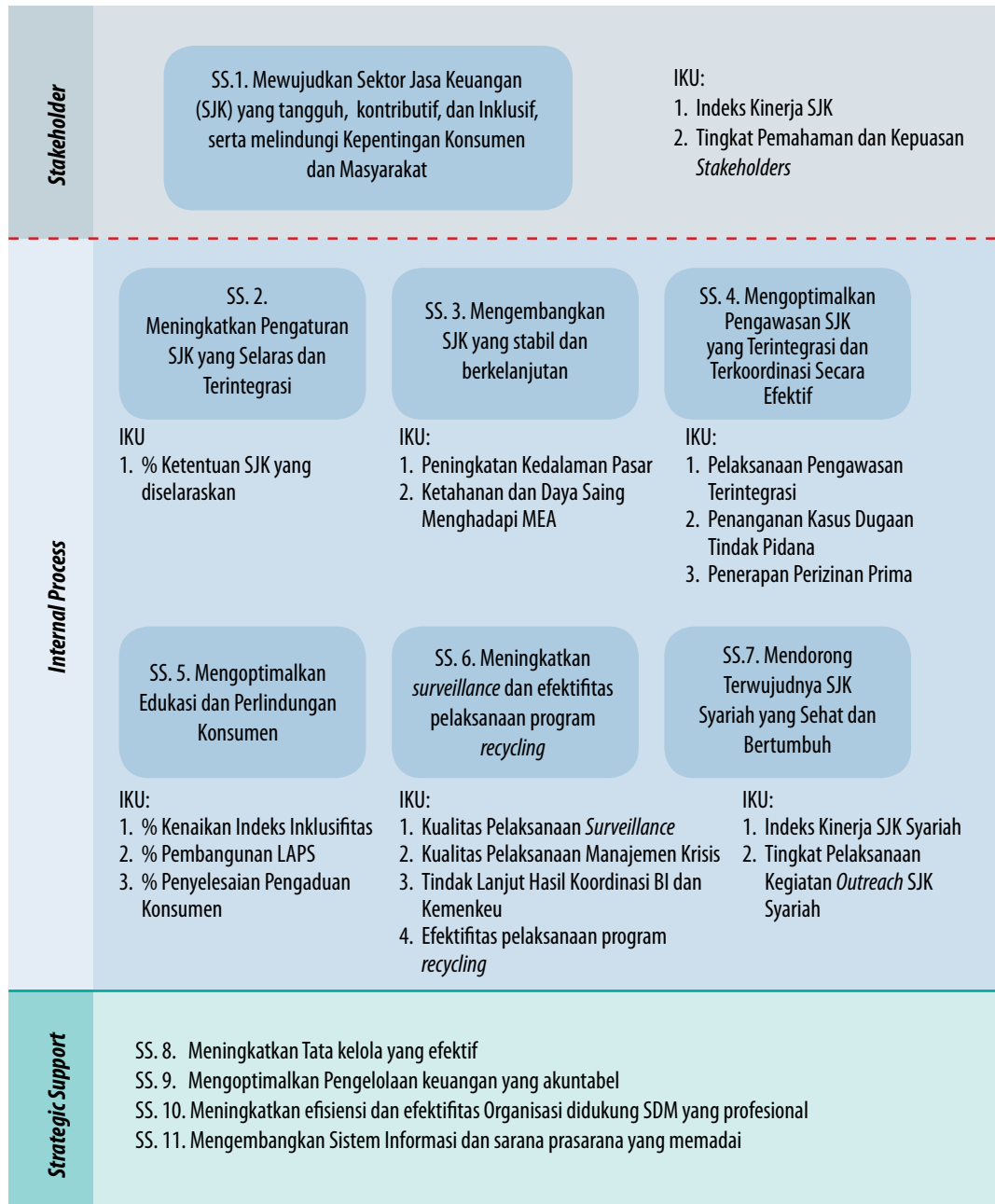


**Manajemen Kinerja**, yang menilai kinerja berdasarkan pencapaian strategi, pelaksanaan tugas pokok dan realisasi anggaran, yang terdiri dari penyusunan kontrak kerja, monitoring dan evaluasi/penilaian kinerja organisasi dan individu pegawai.



# Siklus Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja (MSAK)



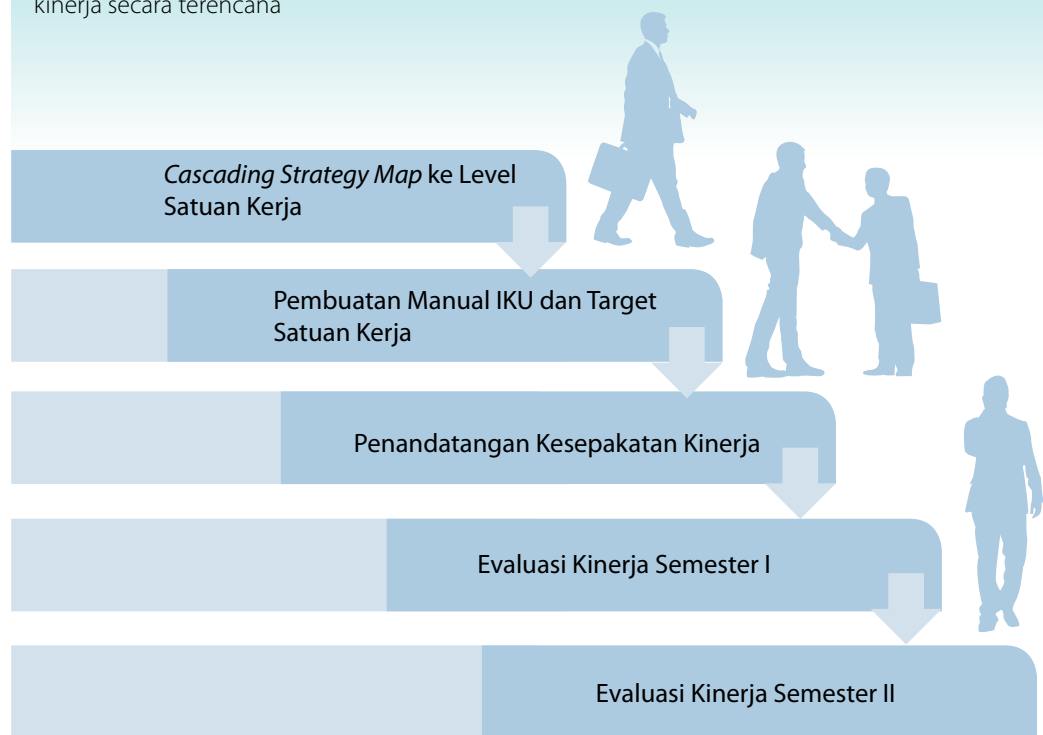


Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dari Strategy Map OJK 2015 serta *Destination Statement* 2017, OJK melaksanakan 5 Inisiatif Strategis antara lain :

- ❖ Inisiatif Strategis 1 : Penyusunan Kerangka Pengembangan SJK Nasional yang Terintegrasi dengan Mempertimbangkan Implementasi MEA untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
- ❖ Inisiatif Strategis 2: Pengembangan Sistem Pengawasan Terintegrasi Berbasis Risiko atas Konglomerasi Keuangan dengan Dukungan SDM dan Infrastruktur yang Memadai
- ❖ Inisiatif Strategis 3: Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia dalam Rangka Mendukung Inklusi Keuangan
- ❖ Inisiatif Strategis 4 : Pengembangan Sistem Pendukung Pengelolaan Stabilitas Sistem Keuangan
- ❖ Inisiatif Strategis 5: Penguatan Infrastruktur dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas OJK



Untuk memastikan bahwa setiap Sasaran Strategis OJK dapat tercapai dan berjalan dengan baik, OJK memiliki proses pengelolaan kinerja yang melibatkan masing masing Satuan Kerja untuk dapat menentukan indikator kinerja serta target selama periode 1 tahun serta melakukan proses penilaian kinerja secara terencana



## Peta Strategi

OJK-WIDE

104,68%

### Stakeholder Perspective

SS1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan yang Tangguh Kontributif dan Inklusif. Menjaga Sistem Keuangan yang Stabil dan Berkelanjutan; dan Melindungi Kepentingan Konsumen dan Masyarakat (OJK-Wide)

102,28%

### Internal Process Perspective

SS2. Meningkatkan Pengaturan Sektor Jasa Keuangan yang Selaras dan Terintegrasi (OJK-Wide)

110,00%

SS3. Mengembangkan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Berdaya Saing Global (OJK-Wide)

103,04%

SS4. Mengoptimalkan Pengawasan SJK yang Terintegrasi dan Terkoordinasi Secara Efektif (OJK-Wide)

108,42%

SS5. Mengoptimalkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (OJK-Wide)

110,00%

SS6. Meningkatkan Surveillance Sistem Keuangan dan Koordinasi Secara Efektif (OJK-Wide)

110,00%

SS7. Mendorong Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan Syariah yang Sehat dan Bertumbuh (OJK-Wide)

98,81%

### Strategic Support Perspective

SS8. Meningkatkan Tata Kelola yang Efektif (OJK-Wide)

106,33%

SS11. Mengembangkan Sistem Informasi dan Sarana Prasarana yang Memadai (OJK-Wide)

99,00%

SS9. Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (OJK-Wide)

104,89%

SS10. Meningkatkan Organisasi yang Terintegrasi, Efisien dan Didukung Sumber Daya Manusia yang Profesional (OJK-Wide)

110,00%

# Perbandingan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan 2014 & 2015

	2014	2015
 <b>Scorecard Kinerja SS dan IKU</b>	103,86%	104,68%
 <b>POJK yang Diterbitkan</b>	39	62
 <b>Pengawasan Terintegrasi</b>	Pelaksanaan Know Your Financial Customer (KYFC) Konglomerasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Satuan Kerja Pengawasan Terintegrasi</li> <li>• Pelaksanaan Forum Panel Pengawasan Terintegrasi</li> </ul>
 <b>Layanan FCC - EPK</b>	30,386	24,328
 <b>Aplikasi dan Sistem yang Telah Dibangun</b>	34	47
 <b>Predikat Laporan Keuangan</b>	WTP	WTP
 <b>Survei Eksternal</b>	4,32 (skala 6)	4,48 (skala 6)



Bab 8

---

**Arah Strategi OJK**

Halaman ini sengaja dikosongkan



### VISI OJK:

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global dan dapat memajukan kesejahteraan umum

### MISI OJK:

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

2012-2014

#### TAHAP AWAL

##### Kegiatan:

- Mengelola masa transisi secara efektif
- Meletakkan fondasi organisasi

##### Tujuan:

Menjadi lembaga yang solid untuk mengelola masa transisi secara aman dan lancar

2015-2017

#### TAHAP KEDUA

##### Kegiatan:

- Transformasi organisasi
- Integrasi regulasi dan pengawasan Lembaga Keuangan (LK)
- LK yang lebih tangguh dan kontributif

##### Tujuan:

Menjadi lembaga yang profesional dalam mendukung pengawasan LK yang efektif dan terintegrasi

2018-2020

#### TAHAP KETIGA

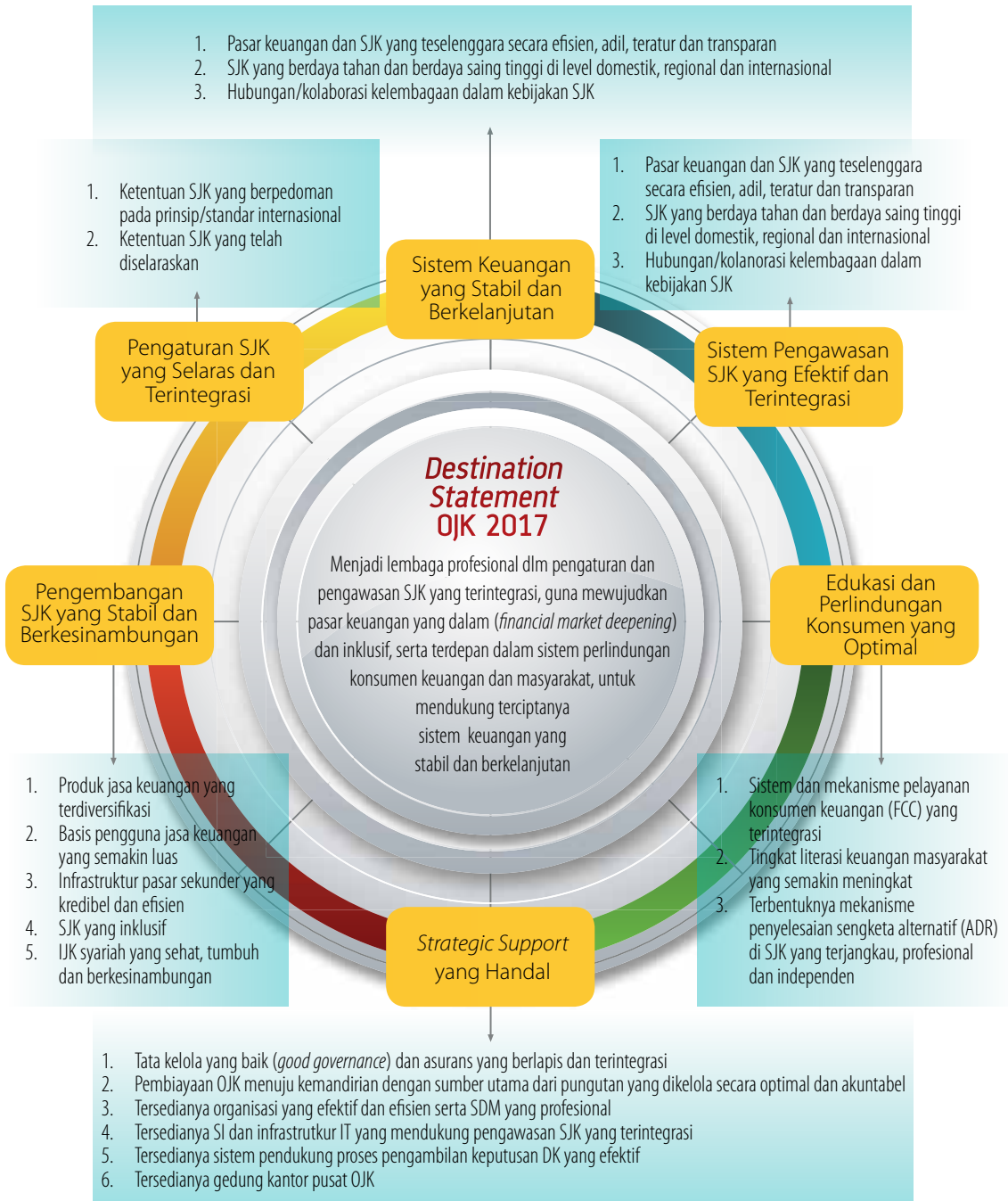
##### Kegiatan:

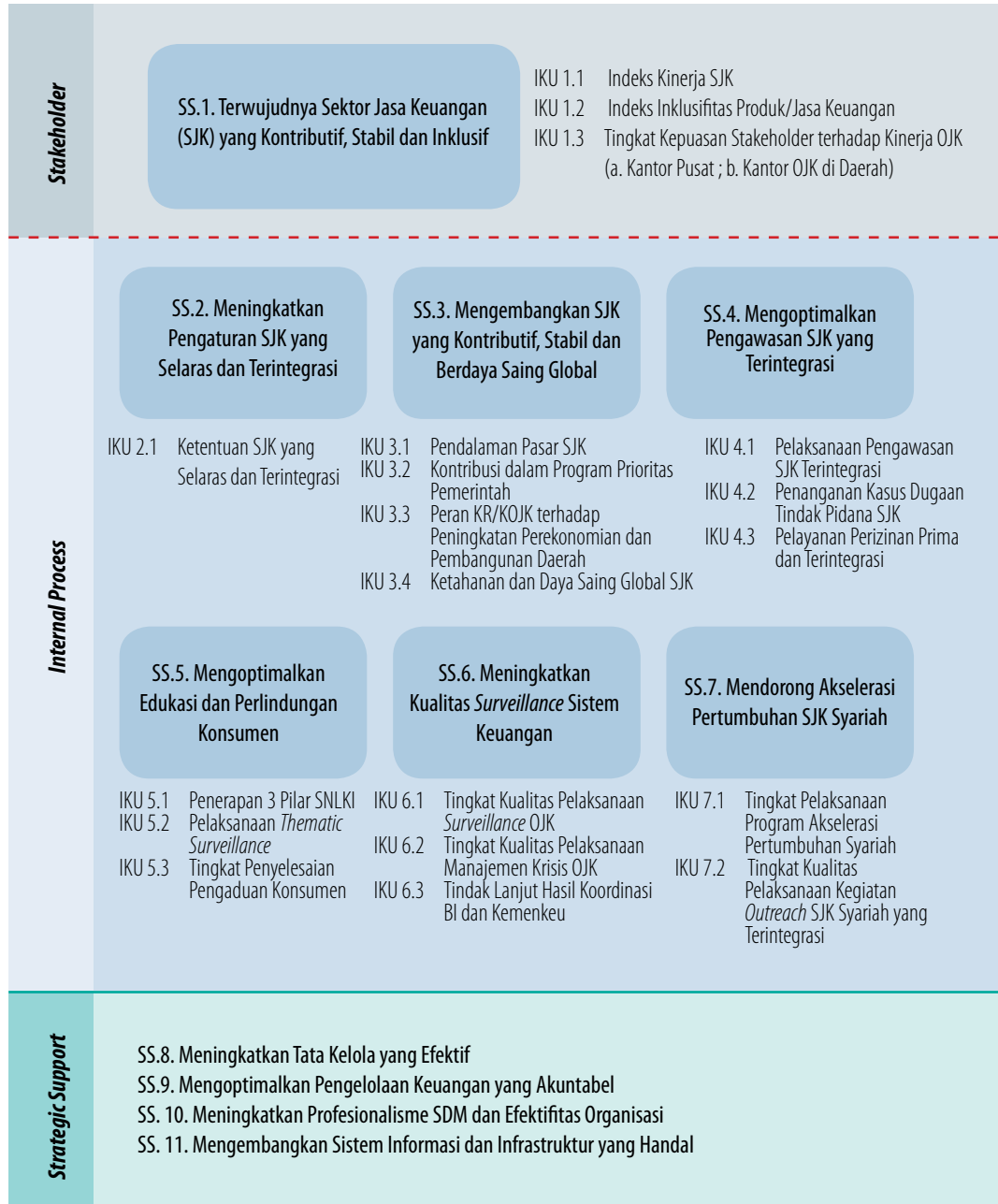
- *Leading integrated regulator*
- Peran strategis di level regional dan internasional

##### Tujuan:

Menjadi lembaga regulator dan pengawas industri keuangan yang terintegrasi, handal, dinamis dan profesional serta disegani di tingkat regional dan internasional

# Destination Statement OJK 2017





Halaman ini sengaja dikosongkan